



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional tentang Standar Harga Satuan Regional yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali kota Makassar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Standar Harga Satuan adalah yang selanjutnya disingkat SHS adalah Pedoman Satuan Harga yang dijadikan acuan dalam penyusunan RKA dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
13. Standar Biaya adalah satuan biaya yang merupakan batas tertinggi yang ditetapkan sebagai biaya/indeks satuan biaya yang digunakan oleh SKPD.
14. Standar Biaya Umum adalah pedoman umum dan batasan biaya maksimal dalam penyusunan RKA dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) SHS dimaksudkan sebagai pedoman SKPD dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (2) SHS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja program atau kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah yang transparan.

BAB III SHS Pasal 3

- (1) SHS digunakan dalam rangka penyusunan pelaksanaan APBD.
- (2) SHS meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - c. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - d. satuan biaya pemeliharaan.
- (3) Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
- (4) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

- (5) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini
- (6) Dalam hal terdapat SHS kegiatan SKPD yang belum diatur dan/atau terjadi perubahan akibat kondisi tertentu dalam Peraturan Wali Kota ini, maka dapat dianggarkan mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain:
 - a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah;
 - b. terjadi kenaikan harga yang melebihi SHS tertinggi;
 - c. terdapat kebutuhan kegiatan SKPD yang sangat penting/ mendesak;
 - d. terdapat kegiatan bersumber dari dana transfer atau bersifat khusus lainnya yang memiliki petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis tersendiri.
- (8) Persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikeluarkan berdasarkan surat permohonan dari Kepala SKPD perihal tambahan atau perubahan SHS dan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. telaahan staf;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - c. matriks SHS; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 10 September 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

MOH.RAMDHAN POMANTO

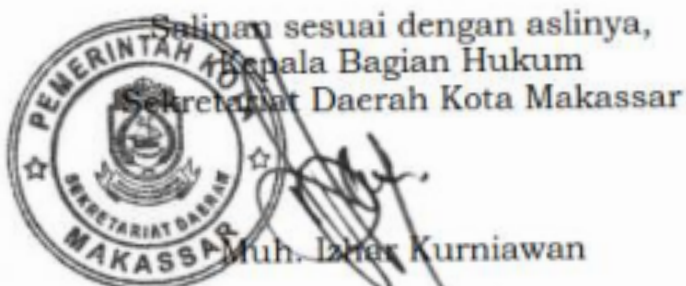
Diundangkan di Makassar
pada tanggal 10 September 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

FIRMAN HAMID PAGARRA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 38



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 38 TAHUN 2024
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2025.

**STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai satuan harga yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) serta dalam perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar, yang terdiri atas:

- I. Satuan biaya honorarium, insentif dan jasa;
- II. Satuan biaya jasa dan tarif umum;
- III. Satuan biaya perjalanan dinas dan pertemuan;
- IV. Satuan biaya pemeliharaan; dan
- V. Satuan biaya sewa.

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM, INSENTIF, DAN JASA

Satuan biaya honorarium, jasa, biaya operasional, dan biaya lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
- 1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- 1.6 Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- 1.7 Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa BUD/PPKD, atau Pembantu BUD/PPKD
- 1.8 Staf/Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;

- b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK-SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya;
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut :
 - 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA;
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK-SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK-SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) Jumlah keseluruhan PPK-SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) Jumlah PPK-SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) Jumlah PPK-SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK-SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) Besaran honorarium PPK-SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK-SKPD.
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa:

2.1 Honorarium Pengguna Anggaran.

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Honorarium Pengurus Barang.

Honorarium diberikan kepada pengurus barang untuk mengurus barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Honorarium Pengurus Barang Pembantu/Pembantu Pengurus Barang.

Honorarium diberikan kepada pengurus barang pembantu untuk membantu mengurus barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2.4 Honorarium Pembantu Pengurus Barang
Honorarium diberikan kepada pembantu pengurus barang untuk membantu mengurus barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Honorarium Tunjangan Khusus Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola.

Honorarium tunjangan khusus yang diberikan kepada pengurus barang pengelola dan pembantu pengurus barang pengelola dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan diperhitungkan dalam Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam kategori Tunjangan Obyektif Lainnya.

4. Honorarium Tunjangan Khusus Koordinator Perencanaan Pembangunan Daerah.

Honorarium tunjangan khusus yang diberikan Koordinator perencanaan pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan diperhitungkan dalam Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam kategori Tunjangan Obyektif Lainnya

5. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

5.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas.

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik secara panel atau individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari :
 - 1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

5.2 Honorarium Moderator.

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

5.3 Honorarium Pembawa Acara.

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, Walikota/Wakil Walikota, dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

5.4 Honorarium Panitia.

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Untuk Jumlah Peserta lebih dari 200 (dua ratus) orang, jumlah panitia Keseluruhan yang dapat diberikan honorarium maksimal 20 (dua puluh) orang.

Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

6. **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.**

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

| No. | Jabatan | Jumlah Maksimal |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Pejabat Eselon II | 2 |
| 2 | Pejabat Eselon III | 3 |
| 3 | Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional | 4 |

6.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Walikota atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah;
 - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Walikota; atau
 - 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

6.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dari Tahun Anggaran 2023, maka akan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

7. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

7.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli.

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

7.2 Honorarium Saksi Ahli.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

7.3 Honorarium Beracara.

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

8. Honorarium Penyuluhan Non Pegawai Negeri Sipil.

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023 lebih tinggi daripada satuan biaya umum dalam Peraturan Walikota ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023 dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023;
- b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023; dan
- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023.

9. Honorarium Tenaga Fasilitator.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Fasilitator di lapangan yang ditetapkan berdasarkan Surat Kepala SKPD.

10. Honorarium Tenaga Penunjang Pelaksana Kegiatan Melalui Perjanjian/Perikatan Kerja.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi tenaga penunjang pelaksana kegiatan melalui perjanjian/perikatan kerja yang ditetapkan berdasarkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD.

11. Honorarium Rohaniawan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

12. Honorarium Penerjemah Bahasa.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai penerjemah bahasa.

13. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website.

11.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal.

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

11.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin Atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

11.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website.

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Walikota.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

14. Honorarium Kegiatan Penerbitan Buku.

Honorarium kegiatan penerbitan buku diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi tenaga penyusun penerbitan buku Pemerintah Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

15. Honorarium Penyelenggara Ujian.

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusunan naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Makassar

16. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusunan soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Makassar.

17. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)

15.1 Honorarium Penceramah.

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- d. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

15.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15.3 Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. standar biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

15.4 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

18. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

19. Honorarium Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

2.1 Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah SKPKD.

Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah SKPKD diberikan kepada tenaga Non PNS Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang bertugas pada SKPKD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

2.2 **Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah SKPKD.**

Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah SKPKD diberikan kepada tenaga Non PNS Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang bertugas pada SKPD (selain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

20. Honorarium Tenaga Teknologi Informasi Pada Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.

Honorarium Tenaga IT pada kegiatan Implementasi Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah diberikan kepada Non PNS yang bertugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

21. Honorarium Tenaga Teknologi Informasi Pada Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Daerah.

Honorarium Tenaga IT pada kegiatan Implementasi Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Daerah diberikan kepada Non PNS yang bertugas pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

22. Honorarium Optimalisasi Pajak Online.

Honorarium Tenaga Teknologi Informasi pada kegiatan Optimalisasi Pajak *Online* diberikan kepada Non PNS yang bertugas pada Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

23. Honorarium Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD).

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) atau Kuasa Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

24. Honorarium Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

25. Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).

Honorarium yang diberikan kepada orang yang diangkat menjadi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

26. Honorarium Tenaga Administrasi Perencana.

Honorarium Tenaga Administrasi Perencana yang diberikan kepada tenaga Non PNS Administrasi Perencana, bertugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

27. Honorarium Tenaga Administrasi Pengawasan.

Honorarium yang diberikan kepada tenaga Non PNS yang bertugas pada Inspektorat Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

28. Honorarium Tenaga Administrasi Pelayanan.

Honorarium yang diberikan kepada tenaga Non PNS yang bertugas pada Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

29. Honorarium Tenaga Administrasi Kependudukan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga pengelola administrasi kependudukan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

30. Honorarium Tenaga Administrasi Pengelola Arsip.

Honorarium Tenaga Administrasi yang diberikan kepada tenaga Non PNS Administrasi Perencana, bertugas untuk pengelolaan kearsipan pada SKPD dan Unit SKPD, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

31. Biaya Transportasi Tim Pelaksana Kegiatan.

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja transportasi lokal pegawai dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar diberikan kepada PNS atau Non PNS yang turun ke lapangan dan memberikan kontribusi langsung dalam pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.

32. Honorarium Pengemudi Dan Tenaga Pengamanan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengemudi dan tenaga pengamanan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

33. Honorarium Operator Kapal.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai operator atau sebutan lainnya pada kapal ataupun sejenisnya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

34. Honorarium Tenaga Ahli.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga ahli yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

35. Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Izin Belajar.

72.1 Izin Belajar

Biaya izin belajar merupakan program bantuan izin belajar yang hanya diperuntukkan kepada PNS Pemerintah Kota Makassar. Diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Surat Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS dengan masa kerja pengabdian kepada pemerintah kota minimal 5 tahun;
- b. Perguruan tinggi/Universitas terakreditasi minimal "B";
- c. Dilakukan secara selektif; dan
- d. Diberikan sekaligus.

72.2 Komponen Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa Program Gelar Dalam Wilayah Makassar.

Program tugas belajar merupakan program beasiswa yang hanya diperuntukkan kepada PNS Pemerintah Kota Makassar. Diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Surat Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perguruan tinggi/Universitas terakreditasi minimal "A";
- b. Dilakukan secara selektif; dan
- c. Program beasiswa dimaksud diberikan mulai dari awal tugas belajar sampai dengan kelulusan.

72.3 Komponen Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa Program Gelar Di Luar Wilayah Makassar (Jawa)

Program tugas belajar merupakan program beasiswa yang hanya diperuntukkan kepada PNS Pemerintah Kota Makassar. Diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Surat Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS dengan masa kerja pengabdian kepada pemerintah kota minimal 5 tahun;
- b. Perguruan tinggi/Universitas berada di pulau Jawa dan terakreditasi minimal "A";
- c. Dilakukan secara selektif; dan
- d. Program beasiswa dimaksud diberikan mulai dari awal tugas belajar sampai dengan kelulusan.

36. Honorarium Tenaga Operator Komputer.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga operator sistem informasi, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

37. Honorarium Jasa Petugas Kebersihan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai petugas kebersihan pada kantor, rusun, puskesmas, dan tempat bertugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

38. Operasional Satgas Kecamatan dan Petugas Kebersihan

Merupakan biaya Operasional yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Satgas kebersihan, petugas kebersihan dan Tenaga Operasional Petugas Pengelolaan Persampahan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

39. Honorarium Petugas Keagamaan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Petugas Keagamaan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

40. Honorarium Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam pelaksanaan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Walikota /Kepala SKPD.

41. Honorarium Koordinasi Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Di Kecamatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai TRIPIKA, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

42. Honorarium Tunjangan Risiko Tinggi

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pemadam kebakaran dan memiliki risiko tinggi, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

43. Operasional Lapangan

Merupakan biaya Operasional yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai petugas lapangan pada SKPD Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Satuan Polisi Pamong Praja, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

44. Honorarium Pengelola Taman Baca

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengelola taman baca, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

45. Honorarium Jasa Pelayanan Umum

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat kegiatan pelayanan umum, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah.

46. Honorarium Peningkatan Kapasitas Kecamatan Dan Biaya Operasional Kelurahan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

47. Honorarium Petugas Sarana dan Prasarana Umum

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai petugas pelaksanaan kegiatan lapangan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

48. Honorarium Urusan Keprotokoleran Sekretariat Daerah

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah.

49. Honorarium Tenaga Ahli Instruktur Pelatihan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli Instruktur Pelatihan dan Pendampingan Kepelatihan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

50. Honorarium Wasit dan Juri Lomba

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai juri lomba, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

51. Honorarium Petugas Upacara

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Petugas Upacara, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

52. Honorarium Petugas Perikanan Dan Pertanian

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Petugas Teknis Lapangan pada Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

53. Honorarium Tenaga Pekerja.

Sebagai standar harga tertinggi yang digunakan membayar pekerja terampil dalam suatu bidang dan juga sebagai dasar perhitungan standar biaya yang lain.

54. Jasa Pelayanan Kesehatan

Biaya yang diberikan kepada seseorang sebagai honorarium ataupun Instansi lain yang digunakan dalam Pelayanan Kesehatan.

55. Honorarium Pekerja Kuliner

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Kuliner, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

56. Jasa Pekerja Kesenian

Biaya yang diberikan kepada seseorang sebagai honorarium ataupun Instansi lain yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan kesenian tertentu.

57. Honorarium BOPP PAUD Negeri

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan pada PAUD Negeri Kota Makassar.

58. Insentif Tenaga Pendidikan Kepulauan

Insentif yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan pada Wilayah Kepulauan Kota Makassar.

59. Insentif bagi pegawai Non-ASN

Standar Biaya tertinggi yang digunakan untuk membayar Insentif yang diberikan kepada pegawai non-asn pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

60. Insentif bagi RT/RW

Insentif yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Ketua RT atau RW sebagai bentuk prestasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan terhadap warga.

Satuan biaya honorarium, insentif dan jasa terinci pada Tabel 1

TABEL 1
SATUAN BIAYA HONORARIUM, INSENTIF DAN JASA

| URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|--|--------|--------------|
| Honorarium PPKD / KPA / PA | | |
| - Nilai sd. Rp. 100 juta | OB | 1,040,000 |
| - Nilai Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta | OB | 1,250,000 |
| - Nilai Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta | OB | 1,450,000 |
| - Nilai Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar | OB | 1,660,000 |
| - Nilai Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar | OB | 1,970,000 |
| - Nilai Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar | OB | 2,280,000 |
| - Nilai Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar | OB | 2,590,000 |
| - Nilai Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar | OB | 3,010,000 |
| - Nilai Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar | OB | 3,420,000 |
| - Nilai Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar | OB | 3,840,000 |
| - Nilai Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar | OB | 4,250,000 |
| - Nilai Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar | OB | 4,770,000 |
| - Nilai Rp.250 miliar sd Rp. 500 miliar | OB | 5,290,000 |
| - Nilai Rp.500 miliar sd Rp. 750 miliar | OB | 5,810,000 |
| - Nilai Rp.750 miliar sd Rp. 1 triliun | OB | 6,330,000 |
| - Nilai di atas Rp.1 triliun | OB | 7,370,000 |
| Honorarium PPTK | | |
| - Nilai sd. Rp. 100 juta | OB | 1,010,000 |
| - Nilai Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta | OB | 1,210,000 |
| - Nilai Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta | OB | 1,410,000 |
| - Nilai Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar | OB | 1,610,000 |
| - Nilai Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar | OB | 1,910,000 |
| - Nilai Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar | OB | 2,210,000 |
| - Nilai Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar | OB | 2,520,000 |
| - Nilai Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar | OB | 2,920,000 |
| - Nilai Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar | OB | 3,320,000 |
| - Nilai Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar | OB | 3,720,000 |
| - Nilai Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar | OB | 4,130,000 |
| - Nilai Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar | OB | 4,630,000 |
| - Nilai Rp.250 miliar sd Rp. 500 miliar | OB | 5,130,000 |
| - Nilai Rp.500 miliar sd Rp. 750 miliar | OB | 5,640,000 |
| - Nilai Rp.750 miliar sd Rp. 1 triliun | OB | 6,140,000 |
| - Nilai di atas Rp.1 triliun | OB | 7,140,000 |
| Honorarium PPK SKPD | | |
| - Nilai sd. Rp. 100 juta | OB | 400,000 |
| - Nilai Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta | OB | 480,000 |
| - Nilai Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta | OB | 570,000 |
| - Nilai Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar | OB | 660,000 |
| - Nilai Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar | OB | 770,000 |
| - Nilai Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar | OB | 880,000 |
| - Nilai Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar | OB | 990,000 |
| - Nilai Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar | OB | 1,250,000 |
| - Nilai Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar | OB | 1,520,000 |
| - Nilai Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar | OB | 1,780,000 |
| - Nilai Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar | OB | 2,040,000 |
| - Nilai Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar | OB | 2,440,000 |

| URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|--|--------|--------------|
| - Nilai Rp.250 miliar sd Rp. 500 miliar | OB | 2,830,000 |
| - Nilai Rp.500 miliar sd Rp. 750 miliar | OB | 3,230,000 |
| - Nilai Rp.750 miliar sd Rp. 1 triliun | OB | 3,620,000 |
| - Nilai di atas Rp.1 triliun | OB | 4,420,000 |
| Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan | | |
| - Nilai sd. Rp. 100 juta | OB | 340,000 |
| - Nilai Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta | OB | 420,000 |
| - Nilai Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta | OB | 500,000 |
| - Nilai Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar | OB | 570,000 |
| - Nilai Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar | OB | 670,000 |
| - Nilai Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar | OB | 770,000 |
| - Nilai Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar | OB | 860,000 |
| - Nilai Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar | OB | 1,090,000 |
| - Nilai Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar | OB | 1,320,000 |
| - Nilai Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar | OB | 1,550,000 |
| - Nilai Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar | OB | 1,780,000 |
| - Nilai Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar | OB | 2,120,000 |
| - Nilai Rp.250 miliar sd Rp. 500 miliar | OB | 2,470,000 |
| - Nilai Rp.500 miliar sd Rp. 750 miliar | OB | 2,810,000 |
| - Nilai Rp.750 miliar sd Rp. 1 triliun | OB | 3,160,000 |
| - Nilai di atas Rp.1 triliun | OB | 3,840,000 |
| Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu | | |
| - Nilai sd. Rp. 100 juta | OB | 260,000 |
| - Nilai Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta | OB | 310,000 |
| - Nilai Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta | OB | 370,000 |
| - Nilai Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar | OB | 430,000 |
| - Nilai Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar | OB | 500,000 |
| - Nilai Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar | OB | 570,000 |
| - Nilai Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar | OB | 640,000 |
| - Nilai Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar | OB | 810,000 |
| - Nilai Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar | OB | 980,000 |
| - Nilai Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar | OB | 1,150,000 |
| - Nilai Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar | OB | 1,330,000 |
| - Nilai Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar | OB | 1,580,000 |
| - Nilai Rp.250 miliar sd Rp. 500 miliar | OB | 1,840,000 |
| - Nilai Rp.500 miliar sd Rp. 750 miliar | OB | 2,090,000 |
| - Nilai Rp.750 miliar sd Rp. 1 triliun | OB | 2,350,000 |
| - Nilai di atas Rp.1 triliun | OB | 2,860,000 |
| Pembantu Bendahara Pengeluaran Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu | | |
| - Nilai Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | OB | 500,000 |
| - Nilai Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar | OB | 570,000 |
| - Nilai Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar | OB | 640,000 |
| - Nilai Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar | OB | 810,000 |
| - Nilai Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar | OB | 980,000 |
| - Nilai Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar | OB | 1,150,000 |
| - Nilai Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar | OB | 1,330,000 |
| - Nilai Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar | OB | 1,580,000 |
| - Nilai Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun | OB | 1,840,000 |
| - Nilai di atas Rp.1 triliun | OB | 2,090,000 |

| URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|---|--------|--------------|
| - Nilai s.d. Rp 500 juta | OB | 260,000 |
| - Nilai Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar | OB | 310,000 |
| - Nilai Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | OB | 370,000 |
| - Nilai Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | OB | 430,000 |
| Staf / Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) | | |
| - Nilai s.d. Rp 500 juta | OB | 400,000 |
| - Nilai Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar | OB | 480,000 |
| - Nilai Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | OB | 570,000 |
| - Nilai Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | OB | 660,000 |
| - Nilai Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | OB | 770,000 |
| - Nilai Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar | OB | 880,000 |
| - Nilai Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar | OB | 990,000 |
| - Nilai Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar | OB | 1,250,000 |
| - Nilai Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar | OB | 1,520,000 |
| - Nilai Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar | OB | 1,780,000 |
| - Nilai Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar | OB | 2,040,000 |
| - Nilai Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar | OB | 2,440,000 |
| - Nilai Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun | OB | 2,830,000 |
| - Nilai di atas Rp.1 triliun | OB | 3,230,000 |
| Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah | | |
| - Koordinator Pengelola Keuangan Daerah (Sekretaris Daerah) | OB | 15,000,000 |
| - BUD/PPKD | OB | 7,370,000 |
| - Kuasa BUD/PPKD | OB | 5,500,000 |
| - Pejabat Pengelola Kas Daerah | OB | 3,500,000 |
| - Pembantu BUD/PPKD (Eselon IV) | OB | 3,000,000 |
| - Pembantu BUD/PPKD (Staf) | OB | 2,500,000 |
| Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah | | |
| - Pengelola Barang Milik Daerah (Sekretaris Daerah) | OB | 20,000,000 |
| - Pengurus Barang Pengelola | OB | 5,500,000 |
| - Pembantu Pengurus Barang Pengelola (Eselon IV) | OB | 3,500,000 |
| - Pembantu Pengurus Barang Pengelola (Staf) | OB | 2,500,000 |
| - Pengurus Barang SKPD | OB | 1,300,000 |
| - Pengurus Barang Pembantu/Pembantu Pengurus Barang | OB | 1,050,000 |
| - Pengurus Barang Pembantu Sekolah | OB | 650,000 |
| Honorarium Moderator | OK | 700,000 |
| Honorarium Moderator (Profesional) | OK | 1,000,000 |
| Honorarium Narasumber | | |
| - Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya | OJ | 1,700,000 |
| - Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Professor / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | OJ | 1,400,000 |
| - Pejabat Eselon I / S3 / yang disetarakan | OJ | 1,200,000 |
| - Pejabat Eselon II / S2 / yang disetarakan | OJ | 1,000,000 |
| - Pejabat Eselon III / S1 / yang disetarakan | OJ | 900,000 |
| - Profesional (Pakar, Praktisi atau Pembicara Khusus) | OJ | 1,700,000 |

| URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|---|----------|--------------|
| Honorarium Pembawa Acara / MC | OK | 400,000 |
| Honorarium Pembawa Acara / MC (Profesional) | OK | 750,000 |
| Honorarium Panitia | | |
| - Penanggung Jawab | OK | 450,000 |
| - Ketua / Wakil Ketua Panitia | OK | 400,000 |
| - Sekretaris | OK | 300,000 |
| - Anggota Panitia | OK | 300,000 |
| Pembaca Do'a | OK | 400,000 |
| Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah | | |
| - Pengarah | OB | 1,500,000 |
| - Penanggung Jawab | OB | 1,250,000 |
| - Ketua | OB | 1,000,000 |
| - Wakil ketua | OB | 850,000 |
| - Sekretaris | OB | 750,000 |
| - Anggota | OB | 750,000 |
| Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah | | |
| - Pengarah | OB | 750,000 |
| - Penanggung Jawab | OB | 700,000 |
| - Ketua | OB | 650,000 |
| - Wakil ketua | OB | 600,000 |
| - Sekretaris | OB | 500,000 |
| - Anggota | OB | 500,000 |
| Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah | | |
| - Ketua / Wakil Ketua | OB | 250,000 |
| - Anggota | OB | 220,000 |
| - Anggota | OK | 220,000 |
| - Ketua / Wakil Ketua | OK | 250,000 |
| Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara | | |
| - Beracara | OK | 1,800,000 |
| - Ahli / Saksi Ahli | OK | 1,800,000 |
| Jasa Penyuluh | | |
| - Non PNS | OK | 1,100,000 |
| - Non PNS - SLTA | OB | 2,100,000 |
| - Non PNS - DI / DII / DIII / Sarjana Terapan | OB | 2,400,000 |
| - Non PNS - Sarjana (S1) | OB | 2,600,000 |
| - Non PNS - Master (S2) | OB | 2,800,000 |
| - Non PNS - Doktor (S3) | OB | 3,000,000 |
| Tenaga Fasilitator / Pendamping | | |
| - Non PNS | Kegiatan | 400,000 |
| - Non PNS - Doktor (S3) | OB | 3,000,000 |

| URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|---|---------------|--------------|
| - Non PNS - Magister (S2) | OB | 2,600,000 |
| - Non PNS - Sarjana (S1) | OK | 1,100,000 |
| - Non PNS - SLTA / DI / DII / DIII | OK | 500,000 |
| - Pengambil Sumpah Jabatan | OK | 400,000 |
| Honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan | OB | 1,500,000 |
| Honorarium Rohaniwan | OK | 400,000 |
| Jasa Penerjemah Bahasa | OH | 1,000,000 |
| Jasa Pengumpul Data / Surveyor | | |
| - Minimal S1 | OB | 1,100,000 |
| - Minimal SMA | Orang / Titik | 8,000 |
| - Minimal SMA | OB | 700,000 |
| Tim Penyusunan Jurnal | | |
| - Penanggung Jawab | Oter | 500,000 |
| - Redaktur | Oter | 400,000 |
| - Penyunting / Editor | Oter | 300,000 |
| - Desain Grafis | Oter | 180,000 |
| - Fotografer | Oter | 180,000 |
| - Sekretariat | Oter | 150,000 |
| - Pembuat Artikel | Per Halaman | 200,000 |
| Tim Penyusunan Buletin / Majalah | | |
| - Penanggung Jawab | Oter | 400,000 |
| - Redaktur | Oter | 300,000 |
| - Penyunting / Editor | Oter | 250,000 |
| - Desain Grafis | Oter | 180,000 |
| - Fotografer | Oter | 180,000 |
| - Sekretariat | Oter | 150,000 |
| - Pembuat Artikel | Per Halaman | 100,000 |
| Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website | | |
| - Penanggung Jawab | OB | 500,000 |
| - Redaktur | OB | 450,000 |
| - Editor | OB | 400,000 |
| - Web Admin | OB | 350,000 |
| - Web Developer | OB | 300,000 |
| - Pembuat Artikel | Per Halaman | 100,000 |
| Pemeriksa Hasil Ujian | | |
| - Tingkat Pendidikan Dasar | SM | 5,000 |
| - Tingkat Pendidikan Menengah | SM | 7,500 |
| Pengawas Ujian | | |
| - Tingkat Pendidikan Dasar | OH | 240,000 |

| URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|---|----------------|--------------|
| - Tingkat Pendidikan Menengah | OH | 270,000 |
| Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian | | |
| - Tingkat Pendidikan Dasar | NP | 150,000 |
| - Tingkat Pendidikan Menengah | NP | 190,000 |
| Penyusunan Butir Soal | Per Butir Soal | 100,000 |
| Telaah Bahasa Soal | Per Butir Soal | 20,000 |
| Telaah Materi Soal | Per Butir Soal | 45,000 |
| Penceramah | OJP | 1,000,000 |
| Pengajar Diklat | | |
| - Berasal Dari Luar SKPD Penyelenggara | OJP | 300,000 |
| - Berasal Dari Dalam SKPD Penyelenggara | OJP | 200,000 |
| Penyusun Modul | OM | 5,000,000 |
| Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat s.d 5 hari | | |
| - Penanggung Jawab | OK | 450,000 |
| - Ketua / Wakil ketua | OK | 400,000 |
| - Sekretaris | OK | 300,000 |
| - Anggota | OK | 300,000 |
| Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat 6 s.d 30 hari | | |
| - Penanggung Jawab | OK | 675,000 |
| - Ketua / Wakil ketua | OK | 600,000 |
| - Sekretaris | OK | 450,000 |
| - Anggota | OK | 450,000 |
| Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat lebih dari 30 hari | | |
| - Penanggung Jawab | OK | 900,000 |
| - Ketua / Wakil ketua | OK | 800,000 |
| - Sekretaris | OK | 600,000 |
| - Anggota | OK | 600,000 |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) | | |
| - Pembina | OB | 3,500,000 |
| - Pengarah | OB | 3,000,000 |
| - Ketua | OB | 2,500,000 |
| - Wakil Ketua | OB | 2,000,000 |
| - Sekretaris | OB | 1,500,000 |
| - Anggota | OB | 1,300,000 |
| Honorarium Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | |
| - SKPD (Non ASN) | OB | 1,500,000 |
| - SKPKD (Non ASN) | OB | 3,000,000 |
| Tenaga Teknologi Informasi (yang Bersertifikat IT) (Non PNS) | | |

| URAIAN | | SATUAN | HARGA SATUAN |
|---|---------------------------------------|--------|--------------|
| - | BAPENDA | OB | 6,000,000 |
| - | BAPPEDA | OB | 6,500,000 |
| - | BPKAD | OB | 8,000,000 |
| Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) | | | |
| - | PPKD | OB | 5,000,000 |
| - | Kuasa PPKD | OB | 4,000,000 |
| Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah | | | |
| - | Ketua | OK | 3,500,000 |
| - | Sekretaris | OK | 3,000,000 |
| - | Anggota | OK | 2,500,000 |
| - | Ketua Sekretariat | OB | 1,500,000 |
| - | Sekretaris Sekretariat | OB | 1,300,000 |
| - | Anggota Sekretariat | OB | 1,000,000 |
| Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) | | | |
| - | Ketua | OB | 1,500,000 |
| - | Sekretaris | OB | 1,300,000 |
| - | Anggota | OB | 1,000,000 |
| - | Ketua Sekretariat | OB | 1,000,000 |
| - | Sekretaris Sekretariat | OB | 900,000 |
| - | Anggota Sekretariat | OB | 800,000 |
| Tenaga Administrasi Perencana (Khusus Bappeda) | | OB | 2,500,000 |
| Tenaga Administrasi Pengawasan (Khusus Inpektorat) | | OB | 1,400,000 |
| Tenaga Administrasi Pelayanan (Khusus DPMPTSP) | | OB | 1,500,000 |
| Tenaga Administrasi Kependudukan (Khusus Disdukcapil) | | OB | 500,000 |
| Tenaga Pengelola Arsip di SKPD / UKPD | | OB | 250,000 |
| Jasa Tenaga Supir | | | |
| - | Perjanjian / Perikatan Kerja (Kantor) | OB | 1,500,000 |
| - | Pimpinan SKPD / DPRD | OB | 1,000,000 |
| - | KDH / WKDH | OB | 2,500,000 |
| - | Operator Alat Berat | OB | 2,700,000 |
| - | Mess Pemerintah Kota | OB | 3,300,000 |
| - | Kendaraan Bermotor Khusus | OB | 500,000 |
| - | Tenaga Sopir (7 Jam) | OH | 175,500 |
| Jasa Tenaga Keamanan | | | |
| - | Kantor | OB | 1,000,000 |
| - | Rusun | OB | 1,700,000 |
| - | Mess Pemerintah Kota | OB | 2,500,000 |
| - | Pengawal Pimpinan | OB | 2,500,000 |
| - | UPTD/Kantor Lainnya | OB | 1,500,000 |
| Jasa Operator Kapal | | | |

| URAIAN | | SATUAN | HARGA SATUAN |
|--|---|-----------|--------------|
| - | Awak Kapal / Jetski | OB | 2,500,000 |
| - | Nahkoda Kapal | OB | 3,500,000 |
| - | Supir Speedboat | OB | 750,000 |
| Jasa Tenaga Ahli | | | |
| - | Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya | OJ | 1,700,000 |
| - | Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Professor / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | OJ | 1,400,000 |
| - | Min. SMA / Di Setarakan (Memiliki Sertifikat atau Pengalaman) | OJ | 600,000 |
| - | Pejabat Eselon I / Min. S3 / yang disetarakan | OJ | 1,200,000 |
| - | Pejabat Eselon II / Min. S2 / yang disetarakan | OJ | 1,000,000 |
| - | Pejabat Eselon III / Min. S1 / yang disetarakan | OJ | 900,000 |
| - | Tenaga Ahli (Memiliki Sertifikat atau pengalaman) | OB | 3,300,000 |
| - | Inkubator Center Kategori I | OB | 8,000,000 |
| - | Inkubator Center Kategori II | OB | 5,500,000 |
| - | Inkubator Center Kategori III | OB | 3,300,000 |
| Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Izin Belajar | | | |
| - | Penyelesaian Studi (S2) | OT | 20,000,000 |
| - | Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa Program Gelar Dalam Wilayah Makassar (S2) | OT | 35,000,000 |
| - | Penyelesaian Studi (S3) | OT | 50,000,000 |
| - | Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa Program Gelar Dalam Wilayah Makassar (S3) | OT | 150,000,000 |
| Beasiswa | | | |
| - | Peserta Didik | Per Orang | 150,000 |
| Jasa Tenaga Operator Komputer | | | |
| - | Perencanaan dan Pelaporan Dana Transfer | OB | 750,000 |
| - | Aplikasi / Web | OB | 500,000 |
| - | Pelayanan | OB | 350,000 |
| - | UPTD War Room Smart City | OB | 4,000,000 |
| - | Admin SIPD Perencanaan Kota (Khusus BAPPEDA) | OB | 2,500,000 |
| - | Jasa Programming | Set | 2,925,000 |
| Jasa Petugas Kebersihan | | | |
| - | Kantor | OB | 750,000 |
| - | Luar Kantor | OB | 1,000,000 |
| - | Rusun | OB | 1,200,000 |
| - | Koordinator UPTD | OB | 1,500,000 |
| - | Petugas Sampah Laut | OB | 1,500,000 |
| - | Mess Pemerintah Kota | OB | 2,500,000 |
| - | UPTD/Kantor Lainnya | OB | 1,500,000 |
| - | Biaya Operasional Satgas Kecamatan / Petugas Kebersihan | OH | 50,000 |
| Jasa Petugas Keagamaan | | | |
| - | Jasa Imam Sholat (Hari Raya) | OK | 6,000,000 |
| - | Jasa Imam Sholat (Kegiatan Keagamaan) | OK | 1,000,000 |
| - | Jasa Khatib(Hari Raya) | OK | 7,500,000 |
| - | Jasa Naib Imam Sholat (Hari Raya) | OK | 3,000,000 |
| - | Jasa Naib Khatib (Hari Raya) | OK | 4,000,000 |

| URAIAN | | SATUAN | HARGA SATUAN |
|--|--|--------|--------------|
| - | Jasa Pemandu Dzikir dan Doa | OK | 1,000,000 |
| - | Jasa Pembaca Ayat Suci / Sari Tilawah dan Pembaca Doa | OK | 800,000 |
| - | Jasa Pengelola Mesjid (Balaikota, Sekretariat DPRD dan Gabungan Dinas) | OB | 500,000 |
| Jasa Pelayanan Ketertiban dan Ketentraman Umum | | | |
| - | Jasa Penanganan Gangguan (TNI / POLRI) | OB | 1,500,000 |
| - | Jasa Penertiban (TNI / POLRI / Kejaksaan) | OB | 1,000,000 |
| - | Jasa Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum | OK | 500,000 |
| - | Jasa Satlinmas (Anggota Perlindungan Masyarakat) | OB | 250,000 |
| Koordinasi Tripika | | | |
| - | Kecamatan | OB | 600,000 |
| - | Kelurahan | OB | 350,000 |
| Tunjangan Risiko Tinggi (Pemadam Kebakaran) | | OB | 1,950,000 |
| Biaya Operasional Lapangan | | OB | 1,500,000 |
| Pengelola Taman Baca | | OB | 400,000 |
| Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | |
| - | Ketua LPM | OB | 1,000,000 |
| - | Sekretaris LPM | OB | 500,000 |
| - | Bendahara LPM | OB | 500,000 |
| - | Ketua Forum Komunikasi LPM | OB | 300,000 |
| - | Pramusaji / Pendamping Tamu | OB | 1,500,000 |
| - | Penerima dan Penjemputan Tamu | OK | 750,000 |
| - | Caraka / Pengantar Surat | OB | 500,000 |
| - | Tim Jejaring UPT PPA dan Shelter (Rumah Aman) | Otri | 2,250,000 |
| Peningkatan Kapasitas Dan Operasional | | | |
| - | Kecamatan | OB | 250,000 |
| - | Kelurahan | OB | 500,000 |
| - | Khusus Kecamatan dan Kelurahan (Kepulauan) | OB | 700,000 |
| Jasa Petugas Sarana dan Prasarana Umum | | | |
| - | Gudang Alokon | OB | 300,000 |
| - | Pengelolaan RTH | OB | 1,000,000 |
| - | Sarana dan Prasarana UPTD | OB | 1,000,000 |
| - | Sarana dan Prasarana (Koordinator) | OB | 1,500,000 |
| - | CCTV | OB | 1,000,000 |
| - | Satgas Pekerja Terampil | OB | 2,600,000 |
| - | Satgas Tukang | OB | 3,100,000 |
| - | Swakelola Kelurahan | OB | 1,200,000 |
| - | Satgas Gedung dan Perbengkelan | OB | 3,300,000 |
| - | Satgas Pekerja Mahir | OB | 2,800,000 |
| - | Operasional Petugas Lapangan | OH | 50,000 |
| - | Jasa Kader Sosial | OK | 250,000 |
| - | Rusun | OB | 1,700,000 |
| - | UPTD (Non ASN) | OB | 500,000 |

| URAIAN | | SATUAN | HARGA SATUAN |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|
| Jasa Keprotokoleraan | | | |
| - | KDH / WaKDH | OB | 2,500,000 |
| - | Protokoler Luar Daerah | OB | 3,300,000 |
| Jasa Kepelatihan | | | |
| - | Lokal | OK | 750,000 |
| - | Nasional | OK | 1,100,000 |
| - | Rekrutmen Dan Pembinaan Paskibraka | OK | 2,000,000 |
| - | Marching Band | OB | 7,950,000 |
| - | Koordinator / Pendamping Atlet | OK | 750,000 |
| Wasit / Juri | | | |
| - | Lomba Umum | OJ | 1,000,000 |
| - | Lokal | OK | 750,000 |
| - | Nasional | OK | 1,250,000 |
| Jasa Petugas Upacara | | | |
| - | Kegiatan Hari Besar | OK | 1,500,000 |
| - | Paskibraka | OK | 500,000 |
| Jasa Petugas Perikanan Dan Pertanian | | | |
| - | Lapangan | OB | 1,200,000 |
| - | Tenaga Teknis | OB | 350,000 |
| Jasa Tenaga Pekerja | | | |
| - | Tenaga Juru Ukur | OH | 250,000 |
| - | Tenaga Kepala Tukang | OH | 190,350 |
| - | Tenaga Mandor | OH | 211,500 |
| - | Tenaga Mekanik | OH | 176,250 |
| - | Tenaga Operator Alat Berat | OH | 211,500 |
| - | Tenaga Pekerja | OH | 141,000 |
| - | Tenaga Pembantu Juru Ukur | OH | 211,500 |
| - | Tenaga Pembantu Mekanik | OH | 183,300 |
| - | Tenaga Tukang | OH | 176,250 |
| Jasa Pelayanan Kesehatan | | | |
| - | Dokter Poliklinik | OB | 3,000,000 |
| - | Kader Kesehatan | OK | 500,000 |
| - | Mantri Sunnat / Khitanan | OK | 500,000 |
| - | Paramedis Lapangan | OK | 750,000 |
| - | Paramedis Poliklinik | OB | 400,000 |
| - | Perawat | OB | 2,500,000 |
| - | Petugas Medis Lapangan | OK | 1,500,000 |
| - | Kader Sub PPKBD | OK | 300,000 |
| - | Tim Pendukung (RSUD) | OB | 500,000 |
| Jasa Pekerja Kuliner | | | |
| - | Chef Lokal | OK | 2,000,000 |
| - | Chef Nasional | OK | 10,000,000 |
| - | Juru Masak lokal | OK | 500,000 |
| - | Juru Masak Nasional | OK | 1,000,000 |

| URAIAN | | SATUAN | HARGA SATUAN |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|
| Jasa Pekerja Kesenian dan Kebudayaan | | | |
| - | Jasa Dekorasi Artistik | OH | 250,000 |
| - | Jasa Dekorasi Cahaya | OH | 200,000 |
| - | Jasa Dekorasi Visual effect | OH | 3,000,000 |
| - | Jasa Designer Fashion Lokal | OK | 2,500,000 |
| - | Jasa Designer Fashion Nasional | OK | 30,000,000 |
| - | Jasa Fee Screening Film Panjang | Materi | 15,000,000 |
| - | Jasa Fee Screening Film Pendek | Materi | 5,000,000 |
| - | Jasa Kameramen Kru | OH | 400,000 |
| - | Jasa Kameramen Senior | OH | 500,000 |
| - | Jasa Artis / Penyanyi Jazz Nasional | Orang / Sessi | 12,000,000 |
| - | Jasa Artis / Penyanyi Musik Lokal | Orang / Sessi | 2,500,000 |
| - | Jasa Artis / Penyanyi Musik Nasional | Orang / Sessi | 10,000,000 |
| - | Jasa Kelompok Musik Lokal | Group | 8,000,000 |
| - | Jasa Kelompok Musik Nasional | Group | 15,000,000 |
| - | Jasa Kelompok Musik Jazz Lokal | Group | 10,000,000 |
| - | Jasa Kelompok Musik Jazz Nasional | Group | 17,000,000 |
| - | MUA | Per Orang | 400,000 |
| - | MUA (Karakter Karnaval) | Per Orang | 1,100,000 |
| - | Jasa Model Lokal | OK | 1,000,000 |
| - | Jasa Model Nasional | OK | 4,000,000 |
| - | Jasa Narator | Kegiatan | 6,000,000 |
| - | Jasa Pelukis | OK | 15,000,000 |
| - | Korps Musik Gita Praja Wibawa Satpol PP | OB | 500,000 |
| - | Jasa Penari Dan Pemusik | Kegiatan | 5,000,000 |
| - | Jasa Penata Suara / Musik | OH | 250,000 |
| - | Jasa Kurator | Kegiatan | 15,000,000 |
| - | Akomodasi Pekerja Kesenian | OH | 150,000 |
| Honorarium BOPP PAUD Negeri | | | |
| - | Honorarium Kepala Sekolah | OB | 3,000,000 |
| - | Honorarium Pendidik | OB | 2,500,000 |
| Insentif Tenaga Pendidikan Kepulauan | | | |
| - | Pendidik | OB | 700,000 |
| - | Kependidikan | OB | 500,000 |
| Insentif bagi Pegawai Non ASN | | | |
| - | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Triwulan 1-4 | Tahun | 990,000,000 |
| - | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Triwulan 1-4 | Tahun | 990,000,000 |
| - | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Triwulan 1-4 | Tahun | 590,535,000 |
| - | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Triwulan 1-4 | Tahun | 590,535,000 |
| - | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Triwulan 1-4 | Tahun | 4,207,500,000 |
| - | Pajak Reklame TA. 2025 | Tahun | 552,500,000 |
| - | Pajak Reklame | Tahun | 245,000,000 |
| - | Pajak Reklame, Triwulan 1-4 | Tahun | 603,000,000 |
| - | Pajak Air Tanah TA. 2025 | Tahun | 110,524,875 |

| URAIAN | | SATUAN | HARGA SATUAN |
|---------------------|--|--------|---------------|
| - | Pajak Air Tanah TA. 2024 | Tahun | 60,000,000 |
| - | Pajak Air Tanah, Triwulan 1-4 | Tahun | 48,000,000 |
| - | Pajak Sarang Burung Walet TA. 2025 | Tahun | 375,000 |
| - | Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA. 2025 | Tahun | 1,920,000,000 |
| - | Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Untuk TA. 2024, Triwulan 1-4 | Tahun | 2,710,000,000 |
| - | Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan TA. 2025 | Tahun | 1,940,000,000 |
| - | Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan | Tahun | 1,079,500,000 |
| - | Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan, Triwulan 1-4 | Tahun | 4,300,000,000 |
| - | Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah TA. 2025 | Tahun | 193,585,000 |
| - | Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah, Triwulan 1-4 | Tahun | 128,130,000 |
| - | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) TA. 2025 | Tahun | 6,341,649,000 |
| - | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) TA. 2024 | Tahun | 1,565,500,000 |
| Insentif bagi RT/RW | | | |
| - | Ketua RT | OB | 1,200,000 |
| - | Ketua RW | OB | 1,200,000 |

II. SATUAN BIAYA JASA DAN TARIF UMUM

Satuan biaya jasa dan tarif umum adalah standar harga tertinggi yang digunakan dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar untuk membiayai kegiatan pemerintah Kota Makassar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan bukti pengeluaran yang riil.

Satuan biaya jasa dan tarif umum terinci pada tabel 2

TABEL 2
SATUAN BIAYA JASA DAN TARIF UMUM

| URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|--|-----------|--------------|
| Tagihan Listrik | | |
| - Golongan Tarif P-1 / TR, 1.300 Va | Kwh | 1,049 |
| - Golongan Tarif P-1 / TR, 2.200 Va S.D 5.500 Va | Kwh | 1,076 |
| - Golongan Tarif P-1 / TR, 450 Va | Kwh | 575 |
| - Golongan Tarif P-1 / TR, 6.600 Va S.D 200 Kva | Kwh | 1,352 |
| - Golongan Tarif P-1 / TR, 900 Va | Kwh | 600 |
| - Golongan Tarif P-2 / TM, di Atas 200 Kva | Kwh | 1,523 |
| - Golongan Tarif P-3 / TR, | Kwh | 1,352 |
| - Golongan Tarif P-3 / TR | Kwh | 1,700 |
| Instalasi Tambah Daya Listrik | | |
| - 1.300 VA ke 10.600 VA | Per Titik | 10,844,900 |
| - 2.200 VA ke 10.600 VA | Per Titik | 9,972,800 |
| - 3.500 VA ke 10.600 VA | Per Titik | 8,713,100 |
| - 4.400 VA ke 10.600 VA | Per Titik | 7,841,000 |
| - 5.500 VA ke 10.600 VA | Per Titik | 6,775,100 |
| - 7.700 VA ke 10.600 VA | Per Titik | 4,633,300 |
| Instalasi Sambungan Listrik Baru | | |
| - GOL P3 Daya 10.600 VA | Per Titik | 13,440,200 |
| - GOL P3 Daya 13.200 VA | Per Titik | 16,734,400 |
| - GOL P3 Daya 16.500 VA | Per Titik | 20,915,500 |
| - GOL P3 Daya 23.000 VA | Per Titik | 29,151,000 |
| - GOL P3 Daya 33.000 VA | Per Titik | 41,821,000 |
| - GOL P3 Daya 66.000 VA | Per Titik | 83,632,000 |
| SLO dan NIDI PLN | | |
| - Tarif P3 Daya 10.600 VA | Unit | 1,325,000 |
| - Tarif P3 Daya 16.500 VA | Unit | 2,062,500 |
| - Tarif P3 Daya 13.200 VA | Unit | 1,650,000 |
| - Tarif P3 Daya 23.000 VA | Unit | 2,300,000 |
| - Tarif P3 Daya 33.000 VA | Unit | 3,135,000 |
| - ke Daya 10.600 VA | Unit | 1,325,000 |
| - ke Daya 16.500 VA | Unit | 2,062,500 |
| Tarif PDAM | | |
| - Golongan IIC, ? 31 M3 | M3 | 3,600 |
| - Golongan IIC, 13-20 M3 | M3 | 3,200 |
| - Golongan IIC, 21-30 M3 | M3 | 3,400 |
| - Golongan IID, 0-12 M3 | M3 | 3,000 |
| Tagihan Telepon | | |
| - Tarif Telepon Jarak > 500 Km / 6 Detik | Kali | 2,100 |

| URAIAN | | SATUAN | HARGA SATUAN |
|-------------------------------------|--|-----------|---------------|
| - | Tarif Telepon Jarak 20 - 30 Km | Menit | 163 |
| - | Tarif Telepon Jarak 200 - 500 Km / 6 Detik | Kali | 1,770 |
| - | Tarif Telepon Jarak 30 200 Km / 6 Detik | Kali | 1,100 |
| Komunikasi Penunjang Tugas | | | |
| - | Kepala SKPD | Per Bulan | 1,000,000 |
| - | Sekretaris SKPD | Per Bulan | 750,000 |
| - | Kepala Bidang | Per Bulan | 500,000 |
| - | Kepala Sub Bidang / Bagian | Per Bulan | 300,000 |
| Biaya Langganan Internet | | | |
| - | Dedicated Domestik Speed 10 Mbps | Per Bulan | 2,059,200 |
| - | Dedicated Domestik Speed 20 Mbps | Per Bulan | 3,370,400 |
| - | Dedicated IP Transit Domestik Speed 30 Mbps | Per Bulan | 6,500,000 |
| - | Shered International Speed Up to 50 Mbps | Per Bulan | 488,000 |
| - | Shered International Speed Up to 100 Mbps | Per Bulan | 743,000 |
| - | Dedicated Internasional Speed 20 Mbps | Per Bulan | 16,032,720 |
| - | Dedicated IP Transit Internasional Speed 70 Mbps | Per Bulan | 26,730,000 |
| - | Bapenda | Per Bulan | 60,984,000 |
| - | Jaringan CCTV Terintegrasi | Bulan | 269,900,000 |
| - | Dedicated 1:1 5.500 Mbps | Bulan | 460,000,000 |
| - | Sewa Jaringan Hosting | Tahun | 3,000,000 |
| - | Wifi Managed Services 50 Mbps | Bulan | 1,071,150 |
| Paket Internet | | | |
| - | 2 GB | Per Bulan | 50,000 |
| - | 5 GB | Per Bulan | 75,000 |
| Media Cetak, Digital dan Elektronik | | | |
| - | Kategori 1 | Tahun | 25,000,000 |
| - | Kategori 2 | Tahun | 50,000,000 |
| - | Kategori 3 | Tahun | 75,000,000 |
| - | Kategori 4 | Tahun | 100,000,000 |
| - | Kategori 5 | Tahun | 125,000,000 |
| - | Kategori 6 | Tahun | 150,000,000 |
| - | Kategori 7 | Tahun | 175,000,000 |
| - | Kategori 8 | Tahun | 200,000,000 |
| - | BAPENDA | Tahun | 3,000,000,000 |
| - | Sekretariat Daerah Bagian Protokol | Tahun | 8,500,000,000 |
| Langganan Virtual Meeting | | | |
| - | s/d 100 Peserta | Tahun | 1,700,000 |
| - | s/d 1000 Peserta | Tahun | 30,000,000 |
| - | s/d 300 Peserta | Tahun | 2,200,000 |
| - | s/d 500 Peserta | Tahun | 15,000,000 |
| Langganan Media Cetak | | | |
| - | Kategori 1 | Per Bulan | 80,000 |
| - | Kategori 2 | Per Bulan | 85,000 |
| - | Kategori 3 | Per Bulan | 90,000 |
| - | Kategori 4 | Per Bulan | 100,000 |
| - | Kategori 5 | Per Bulan | 110,000 |
| - | Kategori 6 | Per Bulan | 120,000 |
| - | Kategori 7 | Per Bulan | 130,000 |

| URAIAN | | SATUAN | HARGA SATUAN |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| - | Kategori 8 | Per Bulan | 140,000 |
| - | Kategori 9 | Per Bulan | 145,000 |
| - | Kategori 10 | Per Bulan | 150,000 |
| Perpanjangan Pajak Roda 2 / 3 | | | |
| - | Kategori 1 | Unit / Tahun | 150,000 |
| - | Kategori 2 | Unit / Tahun | 200,000 |
| - | Kategori 3 | Unit / Tahun | 250,000 |
| - | Kategori 4 | Unit / Tahun | 300,000 |
| - | Kategori 5 | Unit / Tahun | 350,000 |
| - | Kategori 6 | Unit / Tahun | 400,000 |
| - | Kategori 7 | Unit / Tahun | 450,000 |
| - | Kategori 8 | Unit / Tahun | 500,000 |
| Perpanjangan Pajak Roda 4 / Lebih | | | |
| - | Kategori 1 | Unit / Tahun | 1,000,000 |
| - | Kategori 2 | Unit / Tahun | 1,100,000 |
| - | Kategori 3 | Unit / Tahun | 1,200,000 |
| - | Kategori 4 | Unit / Tahun | 1,300,000 |
| - | Kategori 5 | Unit / Tahun | 1,400,000 |
| - | Kategori 6 | Unit / Tahun | 1,500,000 |
| - | Kategori 7 | Unit / Tahun | 1,600,000 |
| - | Kategori 8 | Unit / Tahun | 2,250,000 |
| - | Kategori 9 | Unit / Tahun | 2,500,000 |
| - | Kategori 10 | Unit / Tahun | 2,750,000 |
| - | Kategori 11 | Unit / Tahun | 3,000,000 |
| - | Kategori 12 | Unit / Tahun | 3,250,000 |
| - | Kategori 13 | Unit / Tahun | 3,500,000 |
| - | Kategori 14 | Unit / Tahun | 3,750,000 |
| - | Kategori 15 | Unit / Tahun | 4,000,000 |
| - | Kategori 16 | Unit / Tahun | 4,250,000 |
| Tagihan Pelayanan | | | |
| - | User Initiated (UI) | OH | 300 |
| - | Business Initiated (BI) | OH | 1,350 |
| - | SMS Blast Reguler | Tahun | 139,000,000 |

| URAIAN | | SATUAN | HARGA SATUAN |
|--|---|--------------|--------------|
| - | Managed Service OmniChanel dan Layanan Messenger Business | Bulan | 480,000 |
| Pengiriman Surat dan Paket Kantor | | | |
| - | Barang | Kg | 40,000 |
| - | Dokumen | Kali | 40,000 |
| Biaya Asuransi BMD | | | |
| - | Gedung / Kantor Balaikota | Unit / Tahun | 92,000,000 |
| - | Rumah Dinas Sekretaris Daerah | Unit / Tahun | 8,500,000 |
| - | Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Gedung Pertemuan | Unit / Tahun | 19,000,000 |
| - | Rumah Jabatan Wakil Kepala Daerah | Unit / Tahun | 12,500,000 |
| - | Kendaraan Dinas KDH | Unit / Tahun | 27,500,000 |
| - | Kendaraan Dinas Sekda | Unit / Tahun | 7,500,000 |
| Pajak Bumi dan Bangunan Milik Pemerintah Di Luar Kota Makassar | | Unit / Tahun | 15,000,000 |
| Kontribusi Bimtek / Diklat / Pelatihan | | | |
| - | Kategori 1 | Orang / Kali | 1,500,000 |
| - | Kategori 2 | Orang / Kali | 3,000,000 |
| - | Kategori 3 | Orang / Kali | 4,500,000 |
| - | Kategori 4 | Orang / Kali | 6,000,000 |
| - | Kategori 5 | Orang / Kali | 7,500,000 |
| - | Kategori 6 | Orang / Kali | 9,000,000 |
| - | Kategori 7 | Orang / Kali | 10,500,000 |
| - | Kategori 8 | Orang / Kali | 12,000,000 |
| - | Kategori 9 | Orang / Kali | 13,500,000 |
| - | Kategori 10 | Orang / Kali | 15,000,000 |
| - | Kategori 11 | Orang / Kali | 18,000,000 |
| - | Kategori 12 | Orang / Kali | 20,000,000 |
| - | Kategori 13 | Orang / Kali | 22,500,000 |
| - | Kategori 14 | Orang / Kali | 25,000,000 |
| - | Kategori 15 | Orang / Kali | 30,000,000 |
| - | Kategori 16 | Orang / Kali | 35,000,000 |
| - | Sertifikasi Kompetensi Konstruksi | Per Orang | 500,000 |
| Jasa Penyimpanan Arsip (Per Bulan) | | Box | 4,500 |
| Pengiriman Surat dan Paket Kantor | | | |
| - | Barang | Kg | 40,000 |
| - | Dokumen | Kali | 40,000 |
| Jasa Penyelenggaraan Acara | | | |
| - | Kategori I | Paket | 50,000,000 |
| - | Kategori II | Paket | 100,000,000 |
| - | Kategori III | Paket | 150,000,000 |
| - | Kategori IV | Paket | 200,000,000 |
| Hadiah | | | |
| - | Kategori 1 | Kegiatan | 5,000,000 |

| URAIAN | | SATUAN | HARGA SATUAN |
|----------------------------------|--|--------------|----------------|
| - | Kategori 2 | Kegiatan | 10,000,000 |
| - | Kategori 3 | Kegiatan | 15,000,000 |
| - | Kategori 4 | Kegiatan | 20,000,000 |
| - | Kategori 5 | Kegiatan | 25,000,000 |
| - | Kategori 6 | Kegiatan | 30,000,000 |
| - | Kategori 7 | Kegiatan | 50,000,000 |
| - | Kategori 8 | Kegiatan | 70,000,000 |
| - | Kategori 9 | Kegiatan | 80,000,000 |
| - | Kategori 10 | Kegiatan | 400,000,000 |
| - | Kategori 11 | Kegiatan | 500,000,000 |
| Biaya Pelayanan Kesehatan Gratis | | | |
| - | Patologi Anatomi | Tahun | 50,000,000 |
| - | Rujukan Laboratorium | Tahun | 25,000,000 |
| - | Rujukan Radiologi | Tahun | 35,000,000 |
| - | Pergantian Darah | Tahun | 160,000,000 |
| - | Makan dan Minum Pasien | Tahun | 480,000,000 |
| - | Jasa Tenaga Medik | Tahun | 12,000,000,000 |
| Biaya Pelayanan Kesehatan | | | |
| - | IUD/Implant | Orang / Kali | 105,000 |
| - | Foto USG/EKG | Lembar | 31,000 |
| - | Penanganan Jenazah Orang Telantar dan Tidak Mampu | Orang / Kali | 2,000,000 |
| - | Penanganan Orang Gangguan Jiwa dan Terlantar | OT | 4,000,000 |
| Biaya Medical Check Up | | | |
| - | DPRD | OT | 9,000,000 |
| Biaya Iuran Kesehatan BPJS | | | |
| - | Laskar Pelangi Administrasi | OB | 146,000 |
| - | Peserta PBPB PD | OB | 35,000 |
| - | Bantuan Peserta PBPB PD/BP Mandiri Kelas 3 | OB | 2,800 |
| Biaya Iuran Kecelakaan Kera BPJS | | | |
| - | Iuran BPJS Ketenagakerjaan Laskar Pelangi Administrasi | OB | 3,600 |
| - | Kader PPKB dan Sub PPKBD | OB | 2,400 |
| Biaya Iuran Kecelakaan Kera BPJS | | | |
| - | Iuran BPJS Ketenagakerjaan Laskar Pelangi Administrasi | OB | 4,500 |
| - | Kader PPKB dan Sub PPKBD | OB | 3,000 |
| Biaya Jaminan Sosial | | | |
| - | RT | OB | 2,880 |
| - | RW | OB | 3,600 |
| Tarif PNPB KI | | | |
| - | Design Industri | Meter | 200,000 |
| - | Hak Cipta non Software | Meter | 300,000 |
| - | Hak Cipta-Software | Meter | 500,000 |
| - | Merek - Pendaftaran Merk | Kali | 500,000 |
| - | Merk – Pendaftaran | Meter | 500,000 |
| - | Biaya Operasional dan Pendampingan Sertifikasi Halal | Buah | 3,500,000 |
| Kontribusi AKOPSI Pusat | | Tahun | 10,000,000 |

| URAIAN | | SATUAN | HARGA SATUAN |
|---|---|--------------|--------------|
| Kontribusi APEKSI Pusat, UCLG dan City Net | | Tahun | 100,000,000 |
| Kontribusi Apeksi Konwil VI | | Tahun | 55,000,000 |
| Tambahan Biaya SBK Riset Dasar/ Terapan/ Pengembangan | | | |
| - | Publikasi / artikel jurnal nasional terakreditasi | Kegiatan | 10,000,000 |
| - | Publikasi / artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks | Kegiatan | 10,000,000 |
| - | Publikasi / artikel jurnal internasional bereputasi | Kegiatan | 50,000,000 |
| - | Buku Internasional | Kegiatan | 65,000,000 |
| - | Buku Nasional | Kegiatan | 30,000,000 |
| E-Pas Bandara | | OT | 2,500,000 |
| Sertifikasi Halal | | Kali | 1,000,000 |
| Operasional dan Pendampingan Sertifikasi Halal | | Kali | 3,500,000 |
| Uji Kendaraan Bermotor | | Kartu | 25,000 |
| Tarif PNPB KI | | | |
| - | Design Industri | Kali | 200,000 |
| - | Hak Cipta non Software | Kali | 300,000 |
| - | Hak Cipta-Software | Kali | 500,000 |
| - | Merek - Pendaftaran Merk | Kali | 500,000 |
| - | Merk – Pendaftaran | Kali | 500,000 |
| Biaya Asuransi BMD | | | |
| - | Gedung / Kantor Balaikota | Unit / Tahun | 92,000,000 |
| - | Rumah Dinas Sekretaris Daerah | Unit / Tahun | 8,500,000 |
| - | Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Gedung Pertemuan | Unit / Tahun | 19,000,000 |
| - | Rumah Jabatan Wakil Kepala Daerah | Unit / Tahun | 12,500,000 |
| - | Kendaraan Dinas KDH | Unit / Tahun | 27,500,000 |
| - | Kendaraan Dinas Sekda | Unit / Tahun | 7,500,000 |
| Tambahan Biaya SBK Riset Dasar/ Terapan/ Pengembangan | | | |
| - | Publikasi / artikel jurnal nasional terakreditasi | Kegiatan | 10,000,000 |
| - | Publikasi / artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks | Kegiatan | 10,000,000 |
| - | Publikasi / artikel jurnal internasional bereputasi | Kegiatan | 50,000,000 |
| - | Buku Internasional | Kegiatan | 65,000,000 |
| - | Buku Nasional | Kegiatan | 30,000,000 |
| Pakaian Dinas KDH/WKDH | | | |
| - | Pakaian Dinas Harian (PDH) | Set | 3,000,000 |
| - | Pakaian Sipil Harian (PSH) | Set | 3,500,000 |
| - | Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | Set | 5,000,000 |
| - | Pakaian Sipil Resmi (PSR) | Set | 4,000,000 |
| - | Pakaian Dinas Upacara | Set | 2,900,000 |
| Pakaian Dinas DPRD | | | |

| URAIAN | | SATUAN | HARGA SATUAN |
|---|---|--------------|---------------|
| - | Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | Stel | 2,500,000 |
| - | Pakaian Sipil Harian (PSH) | Stel | 1,500,000 |
| - | Pakaian Dinas Harian (PDH) | Stel | 3,000,000 |
| Pakaian Dinas Upacara (PDU) Paskibra/ Danpas dan Pengapit | | Pasang | 2,900,000 |
| Pakaian Olahraga Paskibra/ Danpas dan Pengapit | | Pasang | 1,000,000 |
| Biaya Jasa Sewa Cloud | | | |
| - | VCPU | Unit / Bulan | 280,000 |
| - | RAM (Per 1 GB) | Bulan | 64,000 |
| - | Storage (Per 1 GB) | Bulan | 2,800 |
| - | IP Publik | Bulan | 66,600 |
| Sewa Lisensi | | | |
| - | Software | Unit / Tahun | 2,500,000 |
| - | Firewall | Tahun | 196,000,000 |
| - | Web Host Manager Premiere Cloud 100 Account | Tahun | 18,608,000 |
| - | Call Centre 112 | Tahun | 200,000,000 |
| - | SSL WildCard | Tahun | 17,925,000 |
| - | IP Publik /24 | Tahun | 9,001,000 |
| - | Workload Security | Tahun | 6,300,000 |
| - | Firewall A | Bulan | 1,050,000 |
| - | Firewall B | Unit / Bulan | 14,750,000 |
| - | Media Messenger User Agent | OT | 250,000 |
| Sewa Lisensi CCTV AI | | | |
| - | Vehicle Counting | Tahun | 20,535,000 |
| - | People Counting | Tahun | 20,535,000 |
| - | Crowd Detection | Tahun | 20,535,000 |
| - | API Integration | Bulan | 11,100,000 |
| - | Web Dashboard Custom | Tahun | 13,320,000 |
| - | Managed Service Non Jabodetabek | Triwulan | 9,000,000 |
| - | Vehicle Counting | Tahun | 20,535,000 |
| Garansi CCTV Longwis 4 CCTV dan 1 NVR (1 Tahun) | | Unit / Tahun | 1,200,000 |
| Garansi CCTV Outdoor, 4 Channel | | Unit/Tahun | 1,200,000 |
| Garansi Server | | Tahun | 1,450,000,000 |
| Jasa Konsultansi Non Konstruksi | | | |
| - | Kategori II | Paket | 50,000,000 |
| - | Kategori I | Paket | 25,000,000 |
| - | Kategori II | Paket | 50,000,000 |
| - | Kategori III | Paket | 75,000,000 |
| - | Kategori IV | Paket | 100,000,000 |
| - | Kategori V | Paket | 150,000,000 |
| - | Kategori VI | Paket | 200,000,000 |
| - | Kategori VII | Paket | 3,000,000,000 |
| - | Kategori XI | Paket | 300,000,000 |
| - | Kategori VIII | Paket | 1,000,000,000 |
| Jasa Petugas Kebersihan Melalui Penyedia Jasa | | | |

| URAIAN | | SATUAN | HARGA SATUAN |
|---|---|-----------|---------------|
| - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahun | 250,000,000 |
| - | RSUD | Tahun | 2,322,000,000 |
| - | Bapenda | Tahun | 486,000,000 |
| - | Dinas Pendidikan | Tahun | 324,000,000 |
| - | DPRD | Bulan | 44,600,000 |
| - | Cleaning Service Melalui Penyedia Jasa | OB | 3,300,000 |
| Jasa Petugas Keamanan Melalui Penyedia Jasa | | | |
| - | RSUD | Tahun | 1,320,000,000 |
| - | Bapenda | Tahun | 330,000,000 |
| - | Dinas Pendidikan | Tahun | 396,000,000 |
| Biaya Retribusi Kebersihan | | | |
| - | Kantor | Bulan | 750,000 |
| - | Rusun | Bulan | 1,200,000 |
| Pemusnahan Sampah | | Kg | 25,000 |
| Biaya Jasa Pengolahan Sampah | | Kg | 35,000 |
| Pembersihan, Pengendalian, dan Fumigasi | | | |
| - | Kategori 1 | M2 | 70,000 |
| - | Kategori 2 | Per Bulan | 3,500,000 |
| Biaya Kalibrasi Alat Kesehatan | | | |
| - | After Loading / Brachyterapy | Unit | 2,280,000 |
| - | Alat Hisap Medik (Suction Pump) | Unit | 144,000 |
| - | Angiography | Unit | 1,000,000 |
| - | Anti Decubitus | Unit | 120,000 |
| - | Audiometer | Unit | 396,000 |
| - | Autoclave | Unit | 312,000 |
| - | Bed Side with Defibrillator | Unit | 620,000 |
| - | Blood Bank | Unit | 252,000 |
| - | Blood Pressure Monitor (BPM) Non Invasive Blood Pressure Monitor (NIBP Monitor) | Unit | 162,000 |
| - | Blood Solution Warmer | Unit | 216,000 |
| - | Blood Warmer | Unit | 216,000 |
| - | Bone Densitometer | Unit | 948,000 |
| - | Carbon Dioxide (CO2) Laser Surgery | Unit | 144,000 |
| - | Cardiotocograph (CTG) | Unit | 168,000 |
| - | Centrifuge | Unit | 240,000 |
| - | Centrifuge Refrigerator | Unit | 420,000 |
| - | CT-Scan | Unit | 1,044,000 |
| - | Deep Freezer | Unit | 384,000 |
| - | Defibrillator Monitor | Unit | 300,000 |
| - | Defibrillator with Electrocardiograph (ECG) | Unit | 300,000 |
| - | Defibrillator with Electrocardiograph (ECG) with SPO2 | Unit | 400,000 |
| - | Defibrillator/ DC Shock | Unit | 156,000 |
| - | Dental Unit | Unit | 106,000 |
| - | Dental X-Ray | Unit | 950,000 |
| - | Dental X-Ray Panoramic | Unit | 600,000 |
| - | Dental X-Ray Panoramic with Cephalometric | Unit | 700,000 |
| - | Ear Nose Throat (ENT) Treatment | Unit | 156,000 |
| - | Echo Cardiograph | Unit | 288,000 |

| URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|---|--------|--------------|
| - Electro Convulsion Therapy (ECT) | Unit | 288,000 |
| - Electro Encephalograph (EEG) | Unit | 420,000 |
| - Electro Myograph (EMG) | Unit | 258,000 |
| - Electro Stimulator (EST) | Unit | 288,000 |
| - Electro Surgery Unit (ESU) Couter | Unit | 348,000 |
| - Electrocardiograph (ECG) Monitor | Unit | 168,000 |
| - Electrocardiograph (ECG) | Unit | 180,000 |
| - Fetal Detector/Doppler | Unit | 150,000 |
| - Freezer Laboratorium | Unit | 396,000 |
| - General Purpose X-Ray | Unit | 1,032,000 |
| - General Purpose X-Ray Automated Exposure Computer (AEC) | Unit | 1,440,000 |
| - Haemodialisa | Unit | 210,000 |
| - Heart Rate Monitor | Unit | 300,000 |
| - Infant Warmer | Unit | 240,000 |
| - Infusion Pump | Unit | 288,000 |
| - Inkubator Perawatan | Unit | 324,000 |
| - Laboratorium Inkubator | Unit | 252,000 |
| - Laboratorium Refrigerator | Unit | 252,000 |
| - Laboratorium Rotator | Unit | 144,000 |
| - MCS X-Ray | Unit | 612,000 |
| - Mesin Annaesthesi tanpa Vaporizer tanpa Ventilator | Unit | 228,000 |
| - Mobile C-Arm X-Ray | Unit | 1,008,000 |
| - Mobile Unit X-Ray | Unit | 870,000 |
| - Monitor Pasien (Bed Side monitor) | Unit | 588,000 |
| - Owen | Unit | 396,000 |
| - Paraffin Bath | Unit | 252,000 |
| - Patient Warning System | Unit | 170,000 |
| - Phono Cardiograph | Unit | 156,000 |
| - Photometer | Unit | 168,000 |
| - Pulse Oximetri (SP02 Monitor) | Unit | 180,000 |
| - Short Wave Diathermy/ Micro Wave Diathermy | Unit | 312,000 |
| - Simulator/ Therapy Planning | Unit | 1,032,000 |
| - Spectrophotometer | Unit | 192,000 |
| - Spirometer | Unit | 156,000 |
| - Static Cycle | Unit | 168,000 |
| - Sterilisator Basah | Unit | 204,000 |
| - Sterilisator Kering | Unit | 204,000 |
| - Stirrer | Unit | 150,000 |
| - Syringe Pump | Unit | 288,000 |
| - Tabung Oksigen | Unit | 228,000 |
| - Tensimeter | Unit | 84,000 |
| - Timpanometer | Unit | 264,000 |
| - Tomography | Unit | 828,000 |
| - Traksi | Unit | 168,000 |
| - Treadmill | Unit | 168,000 |
| - Treadmill with Electrocardiograph (ECG) Cardiac Stress Test | Unit | 250,000 |
| - Ultra Sound Therapy (UST) | Unit | 216,000 |
| - Ultrasonography (USG) | Unit | 300,000 |
| - Vacuum Extractor | Unit | 168,000 |
| - Ventilator/ Continous Positive Airways Pressure (CPAP) Respirator Rate/ Ventilator Annaesthesi | Unit | 396,000 |
| - Water Bath | Unit | 216,000 |

| URAIAN | | SATUAN | HARGA SATUAN |
|---------------------------------------|---|------------|--------------|
| - | X-Ray Fluoroscopy (Dual fungsi R/ F) | Unit | 1,116,000 |
| - | X-Ray Mammography | Unit | 912,000 |
| - | X-Ray Therapy | Unit | 848,400 |
| - | Cardiotocograph (CTG) | Tahun | 168,000 |
| - | Dental Unit | Tahun | 168,000 |
| - | Endoscopy Lighter | Tahun | 192,000 |
| - | Fetal Detector/Doppler | Tahun | 156,000 |
| - | Flowmeter (Regulator Oksigen) | Tahun | 192,000 |
| - | High Flow Nasal Canula(HFNC) | Tahun | 396,000 |
| - | Lampu Operasi | Tahun | 192,000 |
| - | Nebulizer | Tahun | 228,000 |
| - | Neopuff | Tahun | 396,000 |
| - | Phototerapy Unit | Tahun | 204,000 |
| - | Portable Oxygen Concentrator | Tahun | 288,000 |
| - | Thermometer Digital | Tahun | 168,000 |
| - | Timbangan Bayi | Tahun | 180,000 |
| - | Ultrasound Wattmeter | Tahun | 300,000 |
| - | Computed Radiography (CR)/ Digital Radiography (DR) | Tahun | 600,000 |
| - | CT-Scan | Tahun | 2,634,000 |
| - | Integrated Power Console | Tahun | 615,400 |
| - | Keratometri B scan | Tahun | 1,611,700 |
| - | Lampu Sorot | Tahun | 741,500 |
| - | Mikromotor Handpiece | Tahun | 615,400 |
| - | Video Laringoskop | Tahun | 717,400 |
| - | Autorefraktometer | Unit | 288,000 |
| - | Biometer A - Scan | Unit | 2,079,000 |
| - | Blanket Warmer | Unit | 459,000 |
| - | Clinical Middle Ear Analyzer | Unit | 250,000 |
| - | Funduskopi | Unit | 250,000 |
| - | Laparascopy | Unit | 510,000 |
| - | Intensity Laser | Unit | 250,000 |
| - | Mikroskop Mata | Unit | 616,000 |
| - | Mikroskop THT | Unit | 572,000 |
| - | Monitor Mobile | Unit | 712,000 |
| - | Slit Lamp | Unit | 510,000 |
| - | Snellen Proyektor | Unit | 510,000 |
| - | Short Wave Diaterm (SWD) | Unit | 430,000 |
| - | Short Wave Therapy (SWT) | Unit | 430,000 |
| - | Timbangan Obat | Unit | 624,000 |
| - | Timbangan Dewasa | Unit | 478,000 |
| Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor | | Unit | 1,000,000 |
| Biaya Pengujian Laboratorium | | | |
| - | Amoniak Total (NH3-N) | Per Sampel | 111,000 |
| - | Emisi Ammonia (NH3) | Per Sampel | 220,000 |
| - | Escherichia Coli (Fecal Coli) | Per Sampel | 193,000 |
| - | Hidrogen Florida (HF) | Per Sampel | 239,000 |
| - | Kadmium (Cd) | Per Sampel | 155,000 |
| - | Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD) | Per Sampel | 116,000 |
| - | Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD) | Per Sampel | 138,000 |
| - | Kecerahan | Per Sampel | 33,000 |
| - | Minyak atau Lemak | Per Sampel | 193,000 |

| URAIAN | | SATUAN | HARGA SATUAN |
|---|--|------------|--------------|
| - Nitrogen Dioksida (NO ₂) | | Per Sampel | 330,000 |
| - Nitrogen Oksida (NO _x) | | Per Sampel | 140,000 |
| - NO ₃ -N | | Per Sampel | 49,000 |
| - Opasitas Beralas Kertas | | Per Sampel | 150,000 |
| - Padatan Tersuspensi Air Laut (TSS Air Laut) | | Per Sampel | 193,000 |
| - Partikulat (partikel content) | | Per Sampel | 600,000 |
| - Sulfur Dioksida (SO ₂) | | Per Sampel | 330,000 |
| - Sulfur Oksida (SO _x) | | Per Sampel | 140,000 |
| - Total Coliform | | Per Sampel | 137,000 |
| - Total fosfat (T-Phosphat) | | Per Sampel | 80,000 |
| - Total Nitrogen | | Per Sampel | 77,000 |
| - PM 2,5 24 Jam | | Per Sampel | 880,000 |
| - Crude Protein/Crude Fat | | Per Sampel | 119,000 |
| - Lemak Kasar/Crude Fiber | | Per Sampel | 126,000 |
| - Serat Kasar/Crude Ash | | Per Sampel | 138,000 |
| - Kadar Abu | | Per Sampel | 110,000 |
| - Kadar Air Contoh Cairan | | Per Sampel | 129,000 |
| - Kadar Minyak | | Per Sampel | 300,000 |
| - Karbohidrat Metode Titrimetri | | Per Sampel | 213,000 |
| - Nitrat (NO ₃) dalam Makanan | | Per Sampel | 120,000 |
| - Air Raksa | | Per Sampel | 108,000 |
| - Aluminium | | Per Sampel | 53,000 |
| - Arsen | | Per Sampel | 100,000 |
| - Barium | | Per Sampel | 60,000 |
| - Bau | | Per Sampel | 28,000 |
| - Besi | | Per Sampel | 50,000 |
| - Fluorida (F) | | Per Sampel | 183,000 |
| - Hidrokarbon (HC) | | Per Sampel | 330,000 |
| - Karbon Monoksida (CO) | | Per Sampel | 239,000 |
| - Kebisingan | | Per Sampel | 550,000 |
| - Kecepatan Angin | | Per Sampel | 77,000 |
| - Kekeruhan | | Per Sampel | 45,000 |
| - Kesadahan (CaCO ₃) | | Per Sampel | 46,000 |
| - Klorida | | Per Sampel | 70,000 |
| - Koliform Tinja | | Per Sampel | 193,000 |
| - Kromium Valensi 6 | | Per Sampel | 56,000 |
| - Mangan | | Per Sampel | 50,000 |
| - Natrium | | Per Sampel | 51,000 |
| - Nitrit | | Per Sampel | 49,000 |
| - Oksida/Ozon (O ₃) | | Per Sampel | 140,000 |
| - Partikulat Debu (TSP) | | Per Sampel | 880,000 |
| - Perak | | Per Sampel | 133,000 |
| - PM 10 | | Per Sampel | 880,000 |
| - Rasa | | Per Sampel | 15,000 |
| - Selenium | | Per Sampel | 143,000 |
| - Seng | | Per Sampel | 55,000 |
| - Sianida | | Per Sampel | 79,000 |
| - Suhu | | Per Sampel | 20,000 |
| - Sulfat | | Per Sampel | 49,000 |
| - Sulfida (H ₂ S) | | Per Sampel | 133,000 |
| - Sulfur Dioksida (SO ₂) | | Per Sampel | 140,000 |
| - Tembaga | | Per Sampel | 110,000 |

| URAIAN | | SATUAN | HARGA SATUAN |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| - | Timbal | Per Sampel | 84,000 |
| - | Timbal (Pb) | Per Sampel | 330,000 |
| - | Warna | Per Sampel | 20,000 |
| Biaya Pengambilan Contoh dan Sampel | | | |
| - | Air dan Limbah Cair | Kegiatan | 1,750,000 |
| - | Contoh Uji | OH | 530,000 |
| - | Udara Ambien | Kegiatan | 1,750,000 |
| - | Udara Emisi | Kegiatan | 3,300,000 |
| - | Pengelola Laboratorium Inovasi | OB | 2,400,000 |
| Jasa Packing | | M3 | 975,000 |

III. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PERTEMUAN

1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas

Satuan biaya perjalanan dinas digunakan sebagai perencanaan kebutuhan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar Kota Makassar yang dilaksanakan oleh Pegawai Pemerintah Kota Makassar dan/atau pihak terkait yang dalam pelaksanaan dapat melampaui sepanjang didukung oleh bukti pengeluaran riil.

Perjalanan dinas meliputi :

- a. Perjalanan dinas dalam Kota
- b. Perjalanan dinas dalam Daerah
- c. Perjalanan dinas dalam Luar Provinsi
- d. Perjalanan dinas luar Negeri

Pelaksanaan perjalanan dinas berpedoman peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perjalanan dinas.

2. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan/*snack* 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan/*snack* 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan/*snack* 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *residence*

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan/*snack* 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. **SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT**
 Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:
- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Tempat pelaksanaan menggunakan standar biaya untuk dilaksanakan di dalam Provinsi Sulawesi Selatan, apabila rapat/pertemuan dilaksanakan pada provinsi lainnya yang tidak diatur pada Peraturan Wali Kota ini, maka merujuk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel.3

TABEL 3
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PERTEMUAN

| URAIAN | | SATUAN | HARGA SATUAN |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|
| Perjalanan Dinas Luar Provinsi | | | |
| - | Walikota / Wakil Walikota: 3 Hari 2 Malam | Oper | 29,500,000 |
| - | Eselon II: 3 Hari 2 Malam | Oper | 13,000,000 |
| - | Eselon III / Gol IV: 3 Hari 2 Malam | Oper | 10,000,000 |
| - | Eselon IV / Gol III / Non ASN : 3 Hari 2 Malam | Oper | 8,000,000 |
| - | Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM | Oper | 7,500,000 |
| Perjalanan Dinas Dalam Provinsi | | | |
| - | Walikota / Wakil Walikota (1 Hari 1 Malam) | OH | 5,450,000 |
| - | Eselon II (1 Hari 1 Malam) | OH | 2,130,000 |
| - | Eselon III / Gol IV (1 Hari 1 Malam) | OH | 1,450,000 |
| - | Eselon IV / Gol III / Gol II / Gol I / Non ASN (1 Hari 1 Malam) | OH | 1,162,000 |
| Transportasi Petugas Kalibrasi | | | |
| - | Dalam Daerah | Orang / Kali | 170,000 |

| URAIAN | | SATUAN | HARGA SATUAN |
|---|---|--------------|--------------|
| - | Luar Daerah | Orang / Kali | 2,000,000 |
| Transportasi | | | |
| - | Dalam Daerah | OH | 50,000 |
| - | Wilayah Kepulauan | Oper | 1,000,000 |
| - | Protokoler Bandara / Ketua Forum Musrenbang | OH | 150,000 |
| Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor dalam Provinsi | | | |
| - | Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I Fullboard | Orang / Kali | 1,550,000 |
| - | Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I Fullday | Orang / Kali | 400,000 |
| - | Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I Halfday | Orang / Kali | 250,000 |
| - | Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I Residence | Orang / Kali | 600,000 |
| - | Setingkat Eselon II Fullboard | Orang / Kali | 1,000,000 |
| - | Setingkat Eselon II Fullday | Orang / Kali | 300,000 |
| - | Setingkat Eselon II Halfday | Orang / Kali | 180,000 |
| - | Setingkat Eselon II Residence | Orang / Kali | 500,000 |
| Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Luar Provinsi | | | |
| - | Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I Fullboard | Orang / Kali | 1,216,000 |
| - | Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I Fullday | Orang / Kali | 510,000 |
| - | Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I Halfday | Orang / Kali | 433,000 |
| - | Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I Residence | Orang / Kali | 943,000 |
| - | Setingkat Eselon II Fullboard | Orang / Kali | 1,197,000 |
| - | Setingkat Eselon II Fullday | Orang / Kali | 433,000 |
| - | Setingkat Eselon II Halfday | Orang / Kali | 354,000 |
| - | Setingkat Eselon II Residence | Orang / Kali | 787,000 |
| Perjalanan Dinas Luar Negeri | | | |
| - | Kategori I | Oper | 50,000,000 |
| - | Kategori II | Oper | 100,000,000 |
| - | Kategori III | Oper | 150,000,000 |

IV. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun

perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau bangunan terinci pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN
DALAM NEGERI

| URAIAN | | SATUAN | HARGA SATUAN |
|--------|--------------------------|----------|--------------|
| - | Bertingkat | M2/Tahun | 209,000 |
| - | Tidak Bertingkat | M2/Tahun | 190,000 |
| - | Halaman | M2/Tahun | 11,000 |
| - | Bertingkat, DKI. Jakarta | M2/Tahun | 206,000 |

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut selain roda tiga sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 4.2.

TABEL 4.2
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT
DAN KENDARAAN OPERASIONAL

| URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Kendaraan Dinas Jabatan | | |
| - KDH/WKDH/KETUA DPRD | Unit / Tahun | 45,670,000 |
| - ANGGOTA DPRD | Unit / Tahun | 44,010,000 |
| - ESELON II | Unit / Tahun | 42,130,000 |
| Kendaraan Dinas Operasional | | |
| - Roda Empat | Unit / Tahun | 36,770,000 |
| - <i>Double Gardan</i> | Unit / Tahun | 39,360,000 |
| - Roda Dua | Unit / Tahun | 4,910,000 |
| - Operasional dalam Lingkungan Kantor | Unit / Tahun | 37,110,000 |
| - <i>Speed Boat</i> | Unit / Tahun | 20,240,000 |
| - Roda Tiga | Unit / Tahun | 2,500,000 |

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Pemeliharaan Sedang merupakan pemeliharaan khusus yang tidak bersifat rutin.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 4.3.

TABEL 4.3
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

| URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| Pemeliharaan Rutin | | |
| - Inventaris Kantor | Orang / Tahun | 80,000 |
| - Personal Computer / Notebook | Unit / Tahun | 730,000 |
| - Printer | Unit / Tahun | 690,000 |
| - AC Split | Unit / Tahun | 610,000 |
| - Genset lebih kecil dari 50 KVA | Unit / Tahun | 7,190,000 |
| - Genset 75 KVA | Unit / Tahun | 8,640,000 |
| - Genset 100 KVA | Unit / Tahun | 10,150,000 |
| - Genset 125 KVA | Unit / Tahun | 10,780,000 |
| - Genset 150 KVA | Unit / Tahun | 13,260,000 |
| - Genset 175 KVA | Unit / Tahun | 14,810,000 |
| - Genset 200 KVA | Unit / Tahun | 15,850,000 |
| - Genset 250KVA | Unit / Tahun | 16,790,000 |
| - Genset 275 KVA | Unit / Tahun | 17,760,000 |
| - Genset 300 KVA | Unit / Tahun | 20,960,000 |
| - Genset 350 KVA | Unit / Tahun | 22,960,000 |
| - Genset 430 KVA | Unit / Tahun | 25,620,000 |
| - Genset 500 KVA | Unit / Tahun | 31,770,000 |
| - AC Central | Unit / Tahun | 843,600 |

| URAIAN | | SATUAN | HARGA SATUAN |
|--|---------------------------------|--------------|--------------|
| - | LIFT | Unit / Tahun | 2,300,000 |
| - | Mesin Fotocopy | Unit / Tahun | 6,000,000 |
| - | Website | Unit / Tahun | 10,000,000 |
| Pemeliharaan Sedang | | | |
| - | Mesin Kopi | Unit / Tahun | 5,000,000 |
| - | PAC | Unit / Tahun | 60,606,000 |
| - | AC Central | Unit / Tahun | 3,374,400 |
| - | LIFT | Unit / Tahun | 27,600,000 |
| Pemeliharaan Chainsaw | | | |
| | Kecil | Unit / Tahun | 2,300,000 |
| | Sedang | Unit / Tahun | 2,600,000 |
| | Besar | Unit / Tahun | 3,000,000 |
| | Pemangkas Ranting | Unit / Tahun | 2,500,000 |
| | Mesin Rumput | Unit / Tahun | 2,250,000 |
| Pemeliharaan Alat Uji | | | |
| | Smoke Tester | Unit | 5,000,000 |
| | Gas Analyzer | Unit | 10,000,000 |
| | Break Tester | Unit | 47,000,000 |
| | Axle Load Tester | Unit | 52,000,000 |
| | Headlight Tester | Unit | 17,000,000 |
| | Tint Tester | Unit | 500,000 |
| | Axle Play Detektor | Unit | 60,200,000 |
| | Speedometer | Unit | 65,500,000 |
| | Sound Level | Unit | 500,000 |
| | Side Slip Tester | Unit | 57,000,000 |
| Pemasangan CCTV | | | |
| | tinggi 5 meter | Unit | 6,547,270 |
| | tinggi 9 meter | Unit | 8,003,270 |
| Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan | | | |
| | Alat Kedokteran Umum | Tahun | 100,000,000 |
| | Alat Kedokteran Bedah | Tahun | 100,000,000 |
| | Alat Kedokteran Poliklinik | Tahun | 50,000,000 |
| | Alat Kedokteran Radiodiagnostic | Tahun | 200,000,000 |
| | Alat Kedokteran Gawat Darurat | Tahun | 50,000,000 |
| | Alat Kedokteran ICU | Tahun | 150,000,000 |
| | Alat Kedokteran Lainnya | Tahun | 200,000,000 |
| | Alat Kedokteran Lainnya | Tahun | 200,000,000 |
| Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud | | | |
| | Sim Honor/e-Niaja/ | Tahun | 300,000,000 |
| | Simakda/Simbakda | Tahun | 800,000,000 |

V. SATUAN BIAYA SEWA

Satuan biaya sewa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa menyewa barang ataupun jasa yang dibutuhkan dalam suatu pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar.

5.1. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Satuan biaya sewa peralatan dan perlengkapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa peralatan dan perlengkapan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar.

Satuan biaya sewa peralatan dan perlengkapan terinci pada Tabel 5.1

TABEL 5.1
SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

| URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|------------------------------|-------------|--------------|
| Sewa Genset | | |
| - 1 - 60 KVA | Unit | 6,600,000 |
| - 60 - 80 KVA | Unit | 9,900,000 |
| - 80 - 125 KVA | Unit | 13,200,000 |
| - 125 - 450 KVA | Unit | 31,770,000 |
| - 100 KVA | Unit | 8,000,000 |
| - 140 KVA | Unit | 10,000,000 |
| - 200 KVA | Unit | 12,000,000 |
| Sewa Lighting | | |
| Kapasitas s.d 5.000 W | Set | 6,600,000 |
| Kapasitas s.d 10.000 W | Set | 25,000,000 |
| Kapasitas s.d 20.000 W | Set | 26,400,000 |
| Kapasitas s.d 30.000 W | Set | 33,600,000 |
| Sewa Panggung | | |
| Tinggi s.d 60 cm | M2 Per Hari | 165,000 |
| Tinggi s.d 80 cm | M2 Per Hari | 192,500 |
| Tinggi s.d 100 cm | M2 Per Hari | 275,000 |
| Tinggi s.d 120 cm | M2 Per Hari | 330,000 |
| Panggung | Hari | 5,000,000 |
| Bundar T. 60 cm 3,60 cm | Set | 2,200,000 |
| Sewa Rigging | | |
| Rigging | M2 | 220,000 |
| Rigging | Set | 3,850,000 |
| Sewa Sound System | | |
| - Kapasitas s.d 5000 Watt | Set | 7,700,000 |
| - Kapasitas s.d 10000 Watt | Set | 15,400,000 |
| - Kapasitas s.d 15000 Watt | Set | 23,100,000 |
| - Kapasitas s.d 20000 Watt | Set | 30,800,000 |
| - Kapasitas s.d 25000 Watt | Set | 38,500,000 |
| - Kapasitas s.d 30000 Watt | Set | 46,200,000 |
| Sewa Tenda | | |
| - Hall 5x10 m + Aksesoris | Set | 5,500,000 |
| - Hall 5X10 m + Dekorasi | Set | 7,700,000 |
| - Hanggar 4X10 m + Aksesoris | Set | 1,540,000 |
| - Hanggar 4X10 m + Dekorasi | Set | 3,080,000 |
| - Hanggar 4X12 m + Aksesoris | Set | 1,870,000 |
| - Hanggar 4X12 m + Dekorasi | Set | 3,740,000 |
| - Hanggar 4X6 m + Aksesoris | Set | 990,000 |
| - Hanggar 4X6 m + Dekorasi | Set | 1,870,000 |
| - Hanggar 4X8 m + Aksesoris | Set | 1,265,000 |
| - Hanggar 4X8 m + Dekorasi | Set | 2,530,000 |
| - Roaders + Dekorasi | M2 Per Hari | 330,000 |

| URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|---|-------------|--------------|
| - Roder | M2 Per Hari | 192,500 |
| - Sarnaville 3X3 m | Set | 660,000 |
| - Sarnaville 3X3 m + Aksesoris | Set | 825,000 |
| - Sarnaville 3X3 m + Dekorasi | Set | 1,320,000 |
| - Sarnaville 5X5 m | Set | 1,320,000 |
| - Sarnaville 5X5 m + Aksesoris | Set | 1,540,000 |
| - Sarnaville 5X5 m + Dekorasi | Set | 2,695,000 |
| - Semi 4X5 m | Set | 550,000 |
| - Semi 4X5 m + Aksesoris | Set | 660,000 |
| - Semi 4X5 m + Dekorasi | Set | 770,000 |
| - Semi 4X6 m | Set | 770,000 |
| - Semi 4X6 m + Aksesoris | Set | 935,000 |
| - Semi 4X6 m + Dekorasi | Set | 1,100,000 |
| - Kemah | Set | 200,000 |
| Sewa Dekorasi Booth | | |
| - Partisi Ruang Pameran / Booth | Set | 2,500,000 |
| - Partisi Ruang Pameran / Booth | Set | 5,000,000 |
| - Partisi Ruang Pameran / Booth | Set | 10,000,000 |
| - KDH/WAKDH | M2 | 5,555,560 |
| Sewa Kursi | | |
| - Plastik | Buah | 6,600 |
| - Plastik + Cover | Buah | 16,500 |
| - Susun Besi | Buah | 13,200 |
| - Susun Besi + Cover | Buah | 23,100 |
| - Susun Besi + Cover + Pita | Buah | 31,900 |
| - Tiffany | Buah | 132,000 |
| - Jati | Buah | 220,000 |
| - Cover Kursi | Buah | 9,900 |
| - Pita Kursi | Buah | 8,800 |
| Sewa Meja | | |
| - Meja Bundar + Taplak | Buah | 330,000 |
| - Meja Jati + Taplak | Buah | 220,000 |
| - Meja Partisi | Buah | 330,000 |
| - Meja Plastik | Buah | 22,000 |
| - Meja Besi/Kayu | Buah | 100,000 |
| - Meja Registrasi | Buah | 330,000 |
| Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya | | |
| - Kain Dekorasi Dinding | M | 24,750 |
| - Tangga | Hari | 100,000 |
| - AC Standing 5 PK | Unit | 1,540,000 |
| - Kipas Angin Uap | Unit | 300,000 |
| - Kompor dan Tabung | Unit | 300,000 |
| - Panci | Unit | 50,000 |
| - Wajan | Unit | 50,000 |
| - Beanbag | Buah | 250,000 |
| - Diffuser | Buah | 75,000 |
| - Flooring | M2 | 110,000 |
| - Frame Set | Set | 200,000 |
| - Karpet | M2 | 22,000 |
| - Mesin Jahit | Unit | 250,000 |
| - Mistycool | Unit | 550,000 |
| - Panel Foto/Poster Rangka Kayu Multiplex | Set | 600,000 |
| - Permadani | Roll | 165,000 |
| - TV/Monitor 60 Inch | Unit | 1,500,000 |
| - Videotrone | M2 Per Hari | 1,375,000 |
| - Boom | Unit | 1,000,000 |

| URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|---|-----------|--------------|
| - Camera | Set | 5,000,000 |
| - Drone | Unit | 1,000,000 |
| - Gimbal | Unit | 500,000 |
| - Kamera + Lensa + Tripod | Hari | 1,000,000 |
| - LED Screen | M2 | 1,375,000 |
| - Light Camera | Set | 8,000,000 |
| - Multicamera System | Set | 50,000,000 |
| - Multimedia | Set | 5,000,000 |
| - Reflector | Buah | 75,000 |
| - Sound Recorder | Set | 3,500,000 |
| - Sound Recorder Clip On | Unit | 750,000 |
| - Tripod | Unit | 300,000 |
| - Videotron Modul/Monitor | M2 | 800,000 |
| - HT | Buah | 250,000 |
| - Colocation 42 U | Per Bulan | 25,332,142 |
| - Baju Karnaval | Pcs | 7,000,000 |
| Sewa Pakaian Adat / Tradisional | | |
| - Sederhana | Set | 250,000 |
| - Pakaian adat lengkap | Pasang | 500,000 |
| - Biasa | Pasang | 150,000 |
| Sewa Alat Berat | | |
| - Excavator Standar | Jam | 175,500 |
| - Excavator Long Arm | Jam | 187,200 |
| - Asphalt Distributor | Jam | 6,435,000 |
| - Asphalt Finisher | Jam | 760,500 |
| - Asphalt Liquid Mixer Kap. 20.000 Liter | Jam | 3,978,000 |
| - Asphalt Mixing Plant | Jam | 4,914,000 |
| - Asphalt Sprayer | Jam | 87,800 |
| - Batching Plant | Jam | 193,100 |
| - Wheel Loader | Jam | 409,500 |
| - Crane kap 5 Ton | Jam | 702,000 |
| - Mobile Crane | Jam | 468,000 |
| - Tripod Tinggi 5 M | Jam | 126,400 |
| - Tripod Tinggi 5 M | Jam | 251,600 |
| - Tripod/tackle&handle /crane | Jam | 468,000 |
| - Crane Kap. 25 Ton | Jam | 269,100 |
| - Crane On Track kap.75-100 Ton | Jam | 555,800 |
| - Tripot/tackel & Handle Crane Kap. 2 Ton | Jam | 468,000 |
| - Bulldozer | Jam | 292,500 |
| - Jack Hammer | Jam | 87,800 |
| - Pancang+ Hammer Kap. 0,5 Ton | Jam | 78,400 |
| - Pancang+ Hammer Kap. 2 Ton | Jam | 468,000 |
| - Roller Vibro | Jam | 210,600 |
| - Blending Equipment | Jam | 333,500 |
| - Cold Milling | Jam | 1,287,000 |
| - Concrete Mixer | Jam | 78,400 |
| - Concrete Vibrator | Jam | 819,000 |
| - Excavator | Jam | 760,500 |
| - Flat Bed Truck | Jam | 292,500 |
| - Fulvi Mixer | Jam | 210,600 |
| - Jack Hammer | Jam | 87,800 |
| - Motor Grader | Jam | 643,500 |
| - Mud Pumping Machine | Jam | 643,500 |
| - Pedestrian Roller | Jam | 87,800 |
| - Pneumatic Tyre Roller | Jam | 351,000 |
| - Tandem Roller | Jam | 409,500 |

| URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|--|--------|--------------|
| - Three Wheel Roller | Jam | 234,000 |
| - Truck Mixer | Jam | 409,500 |
| - Vibro Roller | Jam | 292,500 |
| - Water Tanker | Jam | 351,000 |
| - Rock Drill Breaker | Jam | 187,200 |
| - Sheepfoot Roller | Jam | 286,700 |
| - Pancang + Hammer Kap. 1,0 Ton | Jam | 187,200 |
| Sewa Alat Bantu dan Perkakas | | |
| - Genset | Jam | 409,500 |
| - Pompa Lumpur Diesel Kap. 2,5 Kw 3 Inch | Jam | 131,100 |
| - Pompa Lumpur Diesel Kap. 2,5 Kw 4 Inch | Jam | 158,000 |
| - Water Pump Kap. 70-100 Ml | Jam | 46,800 |
| - Chainsaw Kap. 3,9 Kw | Jam | 43,900 |
| - Potong Pipa T1/manual Gergaji /saw | Jam | 18,800 |
| - Slepang | Jam | 46,800 |
| - Chainsaw | Jam | 43,900 |
| - Compressor | Jam | 234,000 |
| - Gunting Pangkas Tanaman | Jam | 17,600 |
| - Mesin Pemotong Rumput Gendong (chainsaw) | Jam | 46,800 |
| - Molen Kap. 0,3 M3 | Jam | 292,500 |
| - Stamper | Jam | 52,700 |
| - Pemotong Pipa T2/mechanik Cylinder Saw | Jam | 23,400 |

5.2. SATUAN PENGHARUM RUANGAN

Satuan biaya sewa pengharum ruangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa peralatan dan perlengkapan pengharum ruangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah kota makassar.

Satuan biaya sewa kamar hotel dalam Kota Makassar terinci pada Tabel.

TABEL 5.2
SEWA PENGHARUM RUANGAN

| URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|--|--------|--------------|
| - DPRD | Bulan | 71,897,000 |
| - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahun | 72,000,000 |
| - Bapenda | Tahun | 75,000,000 |
| - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Tahun | 124,076,000 |

5.3. SATUAN BIAYA SEWA BUNGA DAN LANDSCAPE

Satuan biaya sewa karangan bunga ucapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa bunga dan landscape taman dalam bentuk karangan bunga ucapan, bunga segar dan bunga tiruan dan juga landscape taman dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah Kota Makassar.

Satuan biaya sewa karangan bunga ucapan terinci pada Tabel

TABEL 5.3
SEWA BUNGA DAN LANDSCAPE

| URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|----------------------|-------------|--------------|
| Sewa Karangan Bunga | | |
| Kecil | Hari | 500,000 |
| Sedang | Hari | 1,000,000 |
| Besar | Hari | 1,500,000 |
| Sewa Bunga | | |
| Kecil | Per Bulan | 750,000 |
| Sedang | Per Bulan | 1,750,000 |
| Besar | Per Bulan | 2,750,000 |
| Sewa Landscape Taman | M2 Per Hari | 330,000 |

5.4. SATUAN BIAYA SEWA MOBILITAS DARAT DAN MOBILITAS AIR

Satuan biaya sewa mobilitas darat dan mobilitas air merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa kendaraan baik di darat maupun di laut dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar.

Satuan biaya sewa mobilitas darat dan mobilitas air terinci pada Tabel berikut:

TABEL 5.4
SEWA MOBILITAS DARAT DAN AIR

| URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Kendaraan Roda 4 | | |
| - Tipe A | Hari | 700,000 |
| - Tipe B | Hari | 1,000,000 |
| - Tipe C | Hari | 1,500,000 |
| - Tipe D | Hari | 3,000,000 |
| - Angkutan Barang | Kali | 350,000 |
| - Angkutan Jenazah | Kali | 375,000 |
| Kendaraan Roda 6 | | |
| - Bus Besar | Hari | 3,000,000 |
| - Bus Sedang | Hari | 2,500,000 |
| Mobilitas Air | | |
| - Sedang | Hari | 5,000,000 |
| - Per Trip | Kali | 1,000,000 |
| - Kecil | Hari | 500,000 |
| Sepeda Gunung/Sepeda Hybrid | Hari | 400,000 |
| Kendaraan Operasional | | |
| Pejabat Eselon II | Unit / Bulan | 14,000,000 |
| Pejabat Eselon III | Unit / Bulan | 12,000,000 |
| Pejabat Eselon II | Unit / Tahun | 180,000,000 |
| Dump Truck | Jam | 234,000 |
| Dump Truck Kap. 10 Ton | Jam | 585,000 |
| Kendaraan Mobil Pick Up Dalam Kota | Jam | 14,700 |
| Kendaraan Pengangkut | Jam | 65,600 |

| URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|-----------------|--------|--------------|
| Trailer | Jam | 189,600 |
| Angkut Tongkang | Jam | 93,600 |
| Perahu | Jam | 292,500 |
| Ponton | Jam | 65,600 |
| Rakit | Jam | 234,000 |

5.5. SATUAN BIAYA SEWA TEMPAT DAN PENGINAPAN

Satuan biaya sewa tempat dan penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa tempat dan penginapan untuk keperluan pendukung ataupun pengganti sarana kantor dan kegiatan baik didalam kota Makassar maupun diluar Kota Makassar.

Satuan biaya sewa tempat dan penginapan dapat dilihat pada Tabel 4.5:

TABEL 5.5
SEWA TEMPAT DAN PENGINAPAN

| URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Sewa Gedung / Kantor / Tempat Lainnya | | |
| - Kategori I | Unit / Tahun | 50,000,000 |
| - Kategori II | Unit / Tahun | 75,000,000 |
| - Kategori III | Unit / Tahun | 100,000,000 |
| - Kategori IV | Unit / Tahun | 125,000,000 |
| - Kategori V | Unit / Tahun | 150,000,000 |
| - Kategori VI | Unit / Tahun | 175,000,000 |
| - Kategori VII | Unit / Tahun | 200,000,000 |
| - Kategori VIII | Unit / Tahun | 250,000,000 |
| - Kategori X | Unit / Tahun | 300,000,000 |
| - Mall GTC | M2 Per Bulan | 61,165 |
| Sewa Tempat Penyelenggaraan Acara | | |
| - Kategori I | Hari | 5,000,000 |
| - Kategori II | Hari | 10,000,000 |
| - Kategori III | Hari | 15,000,000 |
| - Kategori V | Hari | 25,000,000 |
| - Kategori VI | Hari | 30,000,000 |
| - Kategori X | Hari | 50,000,000 |
| - Kategori XI | Hari | 65,000,000 |
| Sewa Mess | | |
| - BPSDM | OH | 50,000 |
| - LAN | OH | 75,000 |
| Sewa Stand/Booth | | |
| - Kategori I | Set | 25,000,000 |
| - Kategori II | Set | 50,000,000 |
| - Kategori III | Set | 75,000,000 |
| - Kategori IV | Set | 100,000,000 |

| URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
|---|--------|--------------|
| Sewa Penginapan Daerah | | |
| - Kepala Daerah / Ketua DPRD / Pejabat Eselon I / Setara | OH | 1,550,000 |
| - Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah | OH | 1,500,000 |
| - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II / Setara | OH | 1,020,000 |
| - Pejabat Eselon III / Eselon IV / Golongan IV / Golongan III / Golongan II / Golongan I / Setara | OH | 732,000 |

Keterangan:

OJ : Orang / Jam
 OH : Orang / Hari
 OB : Orang / Bulan
 Otri : Orang / Triwulan
 OT : Orang / Tahun
 OP : Orang / Paket
 OK : Orang / Kegiatan
 OR : Orang / Responden
 Oter : Orang / Terbitan
 OJP : Orang / Jam Pelajaran
 Oper : Orang / Perjalanan
 OM : Orang / Materi
 NM : Naskah / Materi
 SM : Siswa / Mata Ujian

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MOH RAMDHAN POMANTO



Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan